



LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*
PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU
TA 2022



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas dan hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kota Lubuklinggau yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);

- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan,

- 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir Tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah, sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pemerintah daerah, rasio pendapatan asli daerah, dan efisiensi keuangan pemerintah daerah.

IV. Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; dan
- d. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
Menyajikan informasi tentang penjelasan perhitungan saldo anggaran lebih akhir;
- c. Penjelasan pos-pos Neraca
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos neraca;
- d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan dan beban;
- e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos laporan arus kas;
- f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos dalam perubahan ekuitas;
- g. Penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas;
- b. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan;
- c. Kondisi Pegawai/Tenaga Kerja;
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; dan
- e. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

VII. Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

LAMPIRAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari tinjauan indikator makro seperti struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Struktur ekonomi menggambarkan perekonomian suatu wilayah apakah bersifat agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung kategori ekonomi yang paling dominan di wilayah tersebut. Selain itu, perkembangan perekonomian dapat dilihat dari laju pertumbuhan perekonomian apakah meningkat atau melambat dibanding kurun waktu sebelumnya. Adapun pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk dalam kurun waktu tertentu.

Kondisi perekonomian suatu wilayah akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, pasang surut perekonomian global akan berdampak pada perekonomian nasional sampai level kabupaten/kota. Sama halnya dengan Kota Lubuklinggau, perekonomiannya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Sumatera Selatan, perekonomian nasional, bahkan perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai hasil pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga dasar harga konstan yang telah mengeliminasi pengaruh inflasi, sehingga tergambar kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Sepanjang tahun 2022 Kota Lubuklinggau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat yang semakin bagus.

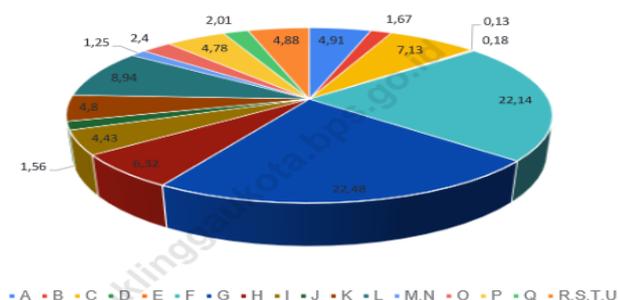


Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2022

Sementara itu, struktur ekonomi Kota Lubuklinggau, selama periode 2018-2022 struktur ekonomi Kota Lubuklinggau masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kegiatan konstruksi. Meskipun lapangan usaha ini secara berturut-turut di tahun 2019 dan tahun 2020 atau pada saat krisis Covid-19 pertumbuhannya berkontraksi minus 2,89 persen dan minus 0,51 persen namun kontribusi dari lapangan usaha ini masih di atas 20 persen dari total PDRB Kota Lubuklinggau. Pada tahun 2022, kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian Kota Lubuklinggau sebesar 22,48 persen, sedangkan kategori konstruksi sebesar 22,14 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran pada tahun 2022, total pengeluaran komponen konsumsi yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, LNPRT dan konsumsi pemerintah mencapai 5.794,19 miliar rupiah. Pada komponen pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) pada tahun 2022 meningkat dari 296,58 miliar rupiah menjadi 3.078,07 miliar rupiah.

Gambar 2.2. Struktur Ekonomi Kota Lubuklinggau 2022

Gambar Figures 12.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Lubuklinggau, 2022
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Lubuklinggau Municipality, 2022



Sumber/Source : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources.

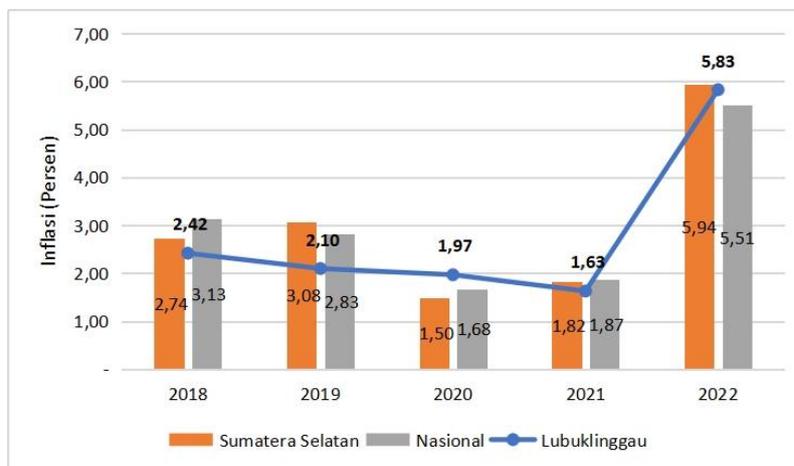
Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) dimana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Lubuklinggau mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir

tahun. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Lubuklinggau juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gagal panen.

Secara umum laju inflasi di Kota Lubuklinggau dari tahun 2015 sampai 2021 memiliki tren yang terus menurun, tetapi di tahun 2022 laju inflasi di Kota Lubuklinggau mencapai 5,83 persen dan kondisi tersebut merupakan inflasi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya inflasi di tahun 2022 menunjukkan naiknya permintaan dan daya beli setelah *pandemic* Covid-19, hal ini juga menunjukkan bahwa ekonomi mengalami pertumbuhan.

Gambar 2.3 Laju Inflasi IHK Kota Lubuklinggau 2018-2022



Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2022

Inflasi dapat didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Dalam arti sempit, laju inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara agregat. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi. Dengan kata lain, terjadi penurunan kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa atau nilai riil menurun. Hal ini tidak hanya merugikan golongan penduduk yang menerima upah tetap, tetapi prospek penanaman modal atau investasi di berbagai sektor kegiatan menjadi terhambat.

Masalah inflasi seringkali menjadi topik yang hangat dalam menganalisis perekonomian suatu daerah atau negara. Laju inflasi yang tinggi dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan perkembangan perekonomian terhambat. Apabila tingkat inflasi sangat rendah atau bahkan deflasi dapat mengakibatkan resesi ekonomi. Beberapa hal yang menyebabkan masalah inflasi ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara serius, antara lain:

1. inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa riil terhadap aset finansial domestik menjadi lebih rendah, bahkan seringkali negatif, sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi;
2. inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri;
3. inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumberdaya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen;
4. inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri; dan
5. inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Inflasi di suatu daerah atau negara pada waktu tertentu dapat berbeda-beda tergantung pada indikator dan tahun dasar yang digunakan. Salah satu indikator yang digunakan adalah perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Biaya Hidup (IBH).

IHK merupakan ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam kurun waktu tertentu atau antar waktu. Untuk memudahkan membaca dan membandingkan rata-rata perubahan harga antar waktu, IHK dihitung mulai tahun dasar. Berdasarkan persentase perubahan IHK tersebut dihitung besaran laju inflasi.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Tema RKP Tahun 2022: *“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”* dan Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 yakni *“Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lubuklinggau pada tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dengan Pemantapan Reformasi Birokrasi”**, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,12 persen;
2. Laju inflasi : 1,94 persen;
3. Kemiskinan : 12,49 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia : 75,44; dan
5. Tingkat pengangguran : 6,15 persen
6. Gini Ratio : 0,296

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2020 serta perkiraan tahun 2022 juga tantangan

yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :

- 1) Meningkatkan sinergisitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi lokal potensial;
- 2) Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) dan berwawasan lingkungan;
- 3) Menyediakan infrastruktur (perekonomian dan sarana-prasarana diluar infrastruktur perekonomian yang secara tidak langsung mendukung perekonomian) secara merata, memadai dan berkualitas untuk menunjang pemerataan pertumbuhan wilayah dan distribusi ekonomi daerah;
- 4) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha; dan
- 5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis serta mendorong tumbuhnya wirausahawan baru.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong investasi padat modal maupun padat karya, program diarahkan pada:
 - (1) Simplifikasi regulasi dalam rangka memudahkan proses perizinan;
 - (2) Meningkatkan keamanan wilayah dengan menekan angka kriminalitas; dan
 - (3) Menciptakan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) kurang mampu.
- b) Penguatan Sektor Kesehatan. Program diarahkan pada:
 - 1) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi;
 - 2) Pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan.
- c) Optimalisasi pertumbuhan sektor perdagangan dengan peningkatan layanan jasa perdagangan. Program diarahkan pada:
 - (1) Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 - (2) Meningkatkan Kinerja Ekspor dan Perdagangan dalam Negeri; dan
 - (3) Meningkatnya standarisasi Pasar Rakyat.
- d) Perluasan Program Perlindungan Sosial. Program diarahkan pada perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk

menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pasca COVID-19.

- e) Meningkatkan konektivitas wilayah dalam rangka pertumbuhan kawasan ekonomi baru dan pemerataan persebaran penduduk, program diarahkan pada:
 - (1) Peningkatan infrastruktur dengan memprioritaskan terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi; dan
 - (2) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman di kawasan pertumbuhan baru.
- f) Penataan sistem transportasi perkotaan dengan mengedepankan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang. Program diarahkan pada:
 - (1) Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan; dan
 - (2) Penataan angkutan umum.
- g) Mengembangkan pariwisata dengan pembangunan destinasi wisata buatan yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan peran investor. Program diarahkan pada :
 - (1) Meningkatkan daya tarik wisata dengan peningkatan objek wisata;
 - (2) Peningkatan kemitraan dan pemasaran pariwisata, dengan menumbuhkan sektor informal; dan
 - (3) Peningkatan infrastruktur menuju kawasan wisata dengan memperhatikan aspek mobilitas.
- h) Penyiapan tenaga kerja disektor jasa, industri dan perdagangan yang produktif dan berdaya saing. Program diarahkan pada :
 - 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan;
 - 2) dan Meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
- i) Mengembangkan kapasitas produksi dan daya saing Koperasi dan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program diarahkan pada :
 - (1) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM; dan
 - (2) Meningkatkan pengembangan IKM.
- j) Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis;
- k) Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi harga barang pokok dan penting; dan
- l) Membuat Lembaga Keuangan Berbasis di Masjid dengan manajemen pengelolaan keuangan syariah berbasis masyarakat.

2.1.2 Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*), sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro.

Sesuai dengan panduan dari “*The System of National Accounts 1993 (SNA)*”, pembagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk negara Indonesia dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas. Dengan demikian, maka nilai pertumbuhan PDRB Kota Lubuklinggau dengan dan tanpa migas adalah sama karena kegiatan sub sektor pertambangan dan industri pengolahan migas tidak ada di kota ini.

Perekonomian Kota Lubuklinggau berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp6,73 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp4,33 triliun. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -0,13%. Adanya pandemi Covid-19 menekan kinerja hampir seluruh lapangan usaha di Kota Lubuklinggau.

Tabel 2.1. PDRB Per Kapita Kota Lubuklinggau Tahun 2017-2021

| URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020*) | 2021**) |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nilai PDRB (Miliar Rp) | | | | | |
| a. ADHB | 5.636,43 | 6.135,21 | 6.643,68 | 6.718,23 | 7.041,97 |
| b. ADHK 2010 | 3.876,14 | 4.106,07 | 4.339,20 | 4.333,67 | 4.470,23 |
| PDRB Perkapita (Ribu Rp) | | | | | |
| a. ADHB | 24.939,73 | 26.765,13 | 28.491,89 | 28.786,89 | 29.734,52 |
| b. ADHK 2010 | 17.150,99 | 17.912,96 | 18.688,96 | 18.509,86 | 19.875,27 |
| Jumlah penduduk (Ribu jiwa) | 226,01 | 229,22 | 233,18 | 233,38 | 236,83 |
| Pertumbuhan (Persen) | 1,41 | 1,43 | 1,73 | 0,09 | 1,48 |

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2022

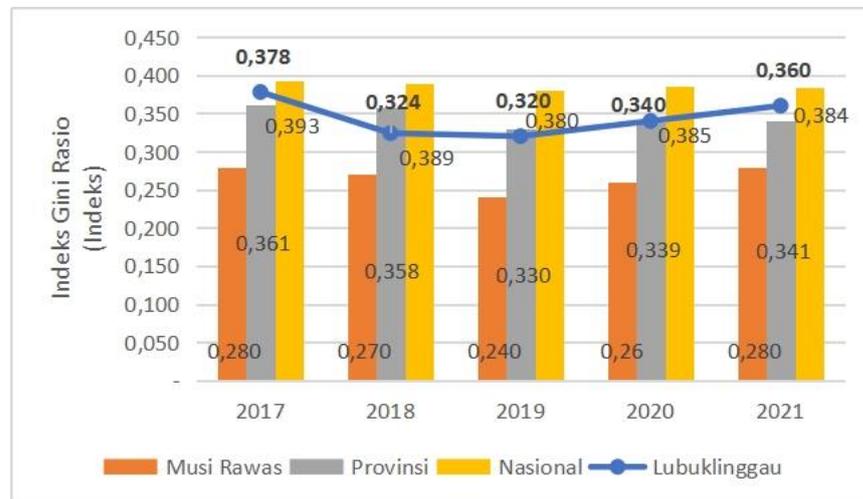
2.1.3 Indeks Gini

Capaian Indeks Gini Kota Lubuklinggau cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Indeks Gini Kota Lubuklinggau pada tahun 2016 mencapai 0,352 mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga mencapai 0,378. Capaian Indeks Gini di Kota Lubuklinggau sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,324 dan 0,320 pada tahun 2019. Capaian Indeks Gini Kota Lubuklinggau kembali meningkat di tahun 2020 mencapai 0,340. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan di Kota Lubuklinggau.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Sumatera Selatan, pada tahun 2020 capaian Indeks Gini Kota Lubuklinggau sedikit lebih tinggi. Namun, jika

dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Nasional, capaian Indeks Gini Kota Lubuklinggau masih lebih baik. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuklinggau secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.4. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuklinggau Tahun 2017-2021

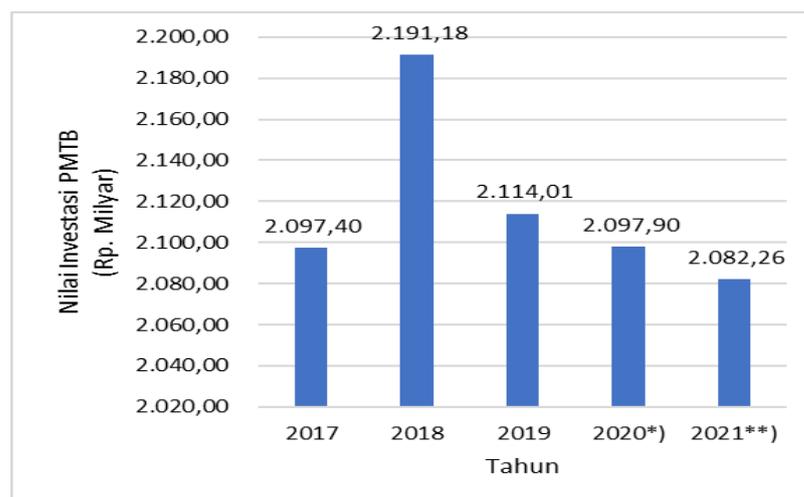


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.4 Perkembangan Investasi

Nilai investasi total Kota Lubuklinggau cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 hingga mencapai Rp. 2.082,26 Milyar. Kondisi ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga berdampak pada iklim investasi.

Gambar 2.5. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuklinggau (Rp. Milyar) 2017-2021



Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2022 (PMTB)

2.1.5 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Besaran ICOR Kota Lubuklinggau pada selama kurun waktu 2017-2021 sangat fluktuatif. Pada tahun 2018, nilai ICOR mengalami peningkatan sebesar 0,41 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2020 nilai ICOR belum dapat dihitung dikarenakan perekonomian Kota Lubuklinggau mengalami kontraksi sebesar 0,13%. Pada tahun 2021 besaran ICOR mencapai 14,85 merupakan masa peralihan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan produksi 1 unit output diperlukan investasi sebesar 14,85 unit hal ini menunjukkan belum efisiennya investasi di Kota Lubuklinggau.

Lebih lanjut perkembangan nilai ICOR di Kota Lubuklinggau tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuklinggau Tahun 2017-2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020*) | 2021**) |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp) | 3.876,14 | 4.106,07 | 4.339,20 | 4.333,67 | 4.470,23 |
| Perubahan (Miliar Rp) | 230,07 | 229,93 | 233,13 | (5,54) | 136,57 |
| PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp) | 1.929,62 | 2.004,65 | 2.066,22 | 2.043,31 | 2.027,41 |
| Bangunan | 1.627,23 | 1.703,87 | 1.786,74 | | |
| Non-Bangunan | 302,4 | 300,78 | 279,49 | | |
| ICOR | 8,39 | 8,72 | 8,86 | n/a | 14,85 |
| *Angka Sementara | | | | | |
| ** Angka Sangat Sementara | | | | | |

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau 2022

Koefisien ICOR yang relatif besar pada tahun 2021 dapat mengindikasikan investasi yang ditanamkan pada periode tersebut relatif besar, sedangkan *output* yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan *output* pada tahun sebelumnya, atau tambahan *output* yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan di Kota Lubuklinggau selama periode 2017-2021 belum efektif sehingga relatif kurang efisien.

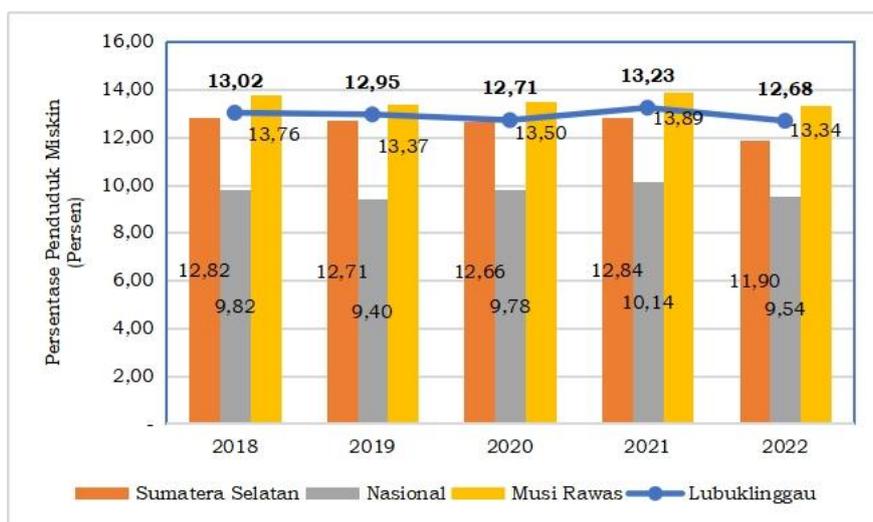
2.1.6 Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Ditinjau dari garis kemiskinan, yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan non makanan, pada tahun 2022, Kota Lubuklinggau memiliki angka garis

kemiskinan sebesar Rp. 541.784. Sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kota Lubuklinggau menunjukkan tren yang terus menurun. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Lubuklinggau mencapai 13,02 dan terus turun hingga mencapai 12,68 persen pada tahun 2022. Angka ini masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 yang mencapai 11,90 persen dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional pada tahun 2022 yang mencapai 9,54 persen.

Gambar 2.6 Presentase Penduduk Miskin Kota Lubuklinggau Tahun 2018 -2022



Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2022

Tabel 2.3. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022

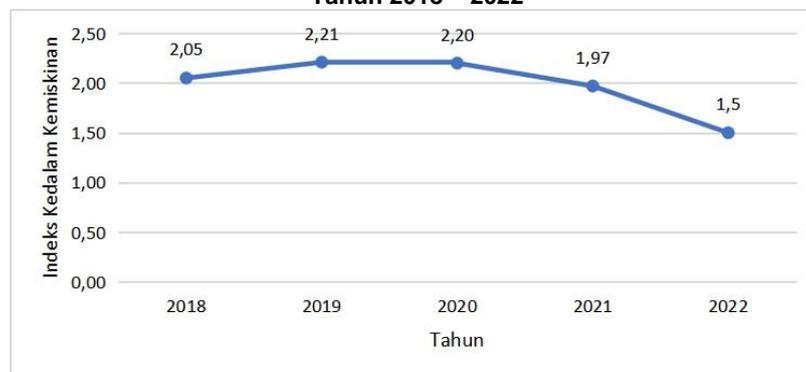
| Tahun | Garis Kemiskinan | | Penduduk miskin | |
|-------|---------------------|-----------|-----------------|-------|
| | (Rp. /Kapita/Orang) | Ribu Jiwa | Ribu Jiwa | % |
| 2018 | 470.897 | 29,74 | | 13,02 |
| 2019 | 477.756 | 29,98 | | 12,95 |
| 2020 | 495.213 | 29,80 | | 12,71 |
| 2021 | 516.763 | 29,80 | | 13,23 |
| 2022 | 541.784 | 30,68 | | 12,68 |

Terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah *head count* (P0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, namun tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Akan tetapi, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan dan penurunan pada P2 mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Lubuklinggau selama kurun waktu 2018-2022 cenderung menurun. Pada tahun 2018, P1 sebesar 2,05 dan turun hingga mencapai 1,5 persen pada tahun 2022. Secara rinci, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuklinggau tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2022



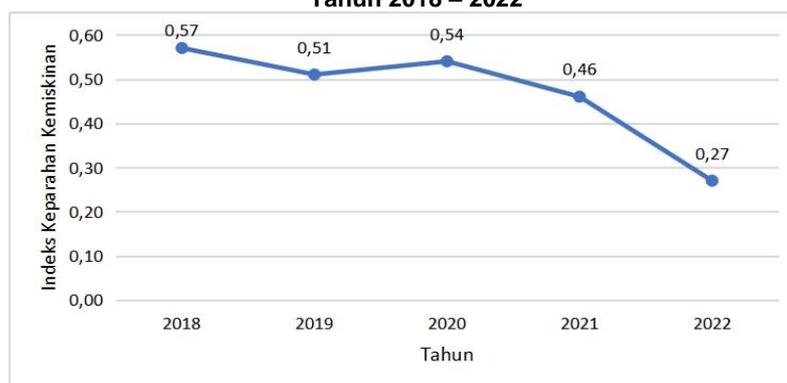
Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuklinggau dalam lima tahun terakhir memiliki tren menurun. Pada tahun 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuklinggau sebesar 0,57, selanjutnya turun signifikan hingga menjadi 0,27 pada tahun

2022. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2022 terus berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Gambar 2.8. Indeks Keperahan Kemiskinan Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kota Lubuklinggau, 2022

2.1.7 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus berikutnya pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah fokus kesejahteraan sosial. Fokus ini memotret kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan dan mengenali permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan hidup) dan rasio penduduk yang bekerja. Berdasarkan capaian indikator IPM, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antar Perangkat Daerah pengampu di lingkungan Kota Lubuklinggau.

2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lubuklinggau cenderung mengalami peningkatan dari 74,89 pada tahun 2018 menjadi 75,53 pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, IPM Kota Lubuklinggau sudah di atas rata-rata capaian Provinsi dan Nasional.

Besar kecilnya angka IPM tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu angka harapan hidup, angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup (GNP Per Kapita). Dengan status yang disandang Kota Lubuklinggau tersebut, maka ada indikasi bahwa pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (daya beli) relatif baik. Peningkatan IPM terjadi karena peningkatan angka harapan hidup penduduk, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita masyarakat.

Gambar 2.9. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.9 Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Lubuklinggau dari tahun 2017 sampai tahun 2022 terus bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk usia kerja yang besar tersebut disertai dengan kualitas yang memadai, maka kondisi ini akan memberikan kontribusi yang positif terhadap keberhasilan program pembangunan di Kota Lubuklinggau. Jumlah dan kualitas penduduk usia kerja pada dasarnya dapat diamati dari beberapa variabel demografi seperti struktur umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikannya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kemudian jumlah penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja di Kota Lubuklinggau juga selalu mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2022.

Tabel 2.4. Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau, 2017-2022

| No. | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | Penduduk Usia Kerja | Orang | 164.206 | 166.934 | 172.300 | 175.127 | n/a |

| No. | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|--------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 2 | Angkatan Kerja | Orang | 111.615 | 118.147 | 121.049 | 128.894 | n/a |
| | Penduduk yang bekerja | Orang | 106.531 | 112.640 | 112.078 | 120.815 | n/a |
| | Pengangguran | Orang | 5.084 | 5.507 | 8.971 | 8.079 | n/a |
| 3 | Bukan Angkatan Kerja | Orang | 52.591 | 48.787 | 51.251 | 46.233 | n/a |
| | Sekolah | Orang | 15.775 | 16.005 | 14.668 | 11.982 | n/a |
| | Mengurus Rumah Tangga | Orang | 31.090 | 27.763 | 30.114 | 29.146 | n/a |
| | Lainnya | Orang | 5.726 | 5.019 | 6.469 | 5.105 | n/a |
| 4 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 67,84 | 70,65 | 70,25 | 73,6 | 67,93 |
| 5 | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | % | 66,44 | 65,44 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 4,59 | 4,71 | 7,41 | 6,27 | 5,94 |
| 7 | Upah Minimum Regional | Rp | 2.595.995 | 2.804.453 | n/a | n/a | n/a |
| 8 | Penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama | | | | | | |
| | Sektor Primer | % | 13,11 | 17,24 | 15,63 | n/a | n/a |
| | Sektor Sekunder | % | 16,92 | 16,15 | 12,05 | n/a | n/a |
| | Sektor Tersier | % | 69,96 | 66,62 | 72,32 | n/a | n/a |

Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2022

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Perubahan APBD TA 2022 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Ikhtisar pencapaian target APBD Tahun 2022, pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Ikhtisar Pencapaian Target APBD

| Uraian | APBD Induk (Rp) | APBD Perubahan (Rp) | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan | 814.086.978.831,00 | 1.090.512.850.566,00 | 1.060.499.402.627,54 |
| 2. Belanja | 906.855.728.831,00 | 1.223.959.581.971,00 | 1.162.820.849.448,20 |
| 3. Surplus/Defisit (1-2) | (92.768.750.000,00) | (133.446.731.405,00) | (102.321.446.820,66) |
| 4. Penerimaan Pembiayaan Daerah | 94.250.000.000,00 | 133.446.731.405,00 | 133.446.731.404,83 |
| 5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1.481.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SiLPA (3+4-5) | | | 31.125.284.584,17 |

3.1 Rasio Keuangan

Perkembangan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka membiayai Belanja Daerah pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Rasio Pendapatan Asli Daerah

| Uraian | 2022 (%) | 2021 (%) |
|-------------------------------|----------|----------|
| Rasio PAD/Total Pendapatan | 9,84 | 13,42 |
| Rasio PAD/Belanja | 8,98 | 13,52 |
| Rasio Pendapatan Transfer/PAD | 915,80 | 622,2 |

3.2 Efisiensi Keuangan

Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp1.060.499.402.627,54 atau sebesar 97,25% dari anggaran sebesar Rp1.090.512.850.566,00 mengalami kenaikan sebesar 10,94% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp955.956.405.192,96, sedangkan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.162.820.849.448,20 dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.223.959.581.971,00 menurun sebesar 22,60% dari realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp948.463.242.185,50.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Lubuklinggau merupakan entitas pelaporan yang oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi yang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun entitas akuntansi yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Lubuklinggau, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi dan Pamong Praja;
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Ketenagakerjaan;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;
28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
29. Badan Pendapatan dan Pajak Daerah;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

31. Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
32. Kecamatan Lubuklinggau Barat II;
33. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
34. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II;
35. Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
36. Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
37. Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan
38. Kecamatan Lubuklinggau Utara II.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah:

- a. Basis Kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan SAL; dan
- b. Basis Akrua, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang disusun sesuai Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang SAP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/2011 tentang Pedoman Umum SAP. Berikut ringkasan definisi, pengakuan, pengukuran, serta penilaian yang diterapkan kebijakan akuntansi.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya

kepada BUD;

- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. Pengakuan Pendapatan-LO dikaitkan dengan penerimaan kas dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan dengan metode *official assessment*. Pengakuan pendapatan-LO seperti ini khusus untuk pendapatan pajak.

- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

- c. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas pada saat penyusunan laporan keuangan

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKRD/Perpres/Permenkeu/Pergub tentang penetapan piutang dana transfer pusat/provinsi dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh

pemerintah daerah. Pengakuan pendapatan-LO metode ini lebih tepat untuk pendapatan non pajak seperti pendapatan retribusi atau pendapatan transfer.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D-Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- d. Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP yang dibayar dari Kas Dana PSG/Kas FKTP diakui sebagai belanja setelah disahkan oleh BUD.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan. Sebagai contoh atas pemakaian bulan Desember ditagihkan dan menjadi beban bulan Januari tahun berikutnya. Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa, atau nilai nominal atau nilai alokasi biaya atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- c. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan bantuan keuangan dibagi menjadi:

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban

transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian Transfer:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan

menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke pemerintah daerah.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat penagihan (rekap bulanan). Untuk piutang selain piutang pajak, piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atas klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yang timbul selama tahun berjalan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian.

a. Pengakuan

- 1) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) Jumlah piutang dapat diukur.
 - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

- 2) Piutang transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, piutang diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan diakhir tahun;
- 3) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar;
- 4) Piutang transfer kurang salur adalah hak Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk menerima pembayaran dari entitas pemberi transfer sebagai akibat kurang salur oleh pemberi transfer;
- 5) Piutang transfer lebih salur terjadi apabila Pemerintah Kota Lubuklinggau menyalurkan transfer melebihi ketetapan alokasi transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan, maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan
- 6) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian;
- 2) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 3) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
- 4) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
- 5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;

- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 sampai dengan 3 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 3 sampai dengan 5 tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun atau usaha wajib pajak sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria piutang sampai dengan 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang lebih dari 3 tahun atau usaha wajib retribusi sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang selain pajak, retribusi, dan transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 bulan s.d 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 tahun s.d 3 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 3 tahun s.d 5 tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 5 tahun atau usaha wajib bayar sudah tutup/tidak ditemukan lagi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak diakui sebagai persediaan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan menggunakan harga perolehan harga pokok produksi/nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan FIFO *method (First in First Out)*/(Metode Masuk Pertama Keluar Pertama).

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengeluaran untuk perolehan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah namun tidak dicatat sebagai Belanja ataupun Pembiayaan dalam LRA. Pendapatan dari Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal saat pemindahan aset kas/non kas yang telah ditetapkan dalam Perda penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan setelah ditetapkan perda tentang penyertaan modal.

Pada kondisi tertentu adanya investasi berupa barang oleh SKPD yang sudah diserahkan kepada BUMD namun belum ditetapkan dalam perda penyertaan. Nilai barang diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal berdasarkan nilai perolehannya. Kondisi ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK dan upaya pembuatan Perda. Koreksi ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Pengakuan Inventasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - 1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal

perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur sebesar nilai perolehannya;

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;

c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3) Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan

4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian Investasi Jangka Panjang permanen pemerintah daerah dilakukan dengan dua metode, sebagai berikut:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan, serta tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Besarnya Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang diragukan tertagih/direalisasikan dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/ Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tertagih/Direalisasikan

| No | Cicilan/pengembalian tertunggak melewati Jatuh Tempo | Persentase Penyisihan |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 bulan s.d. 1 Tahun | 10 % |
| 2 | Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 Tahun s.d. 2 Tahun | 20 % |
| 3 | Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 2 Tahun s.d. 3 Tahun | 50 % |
| 4 | Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 3 Tahun s.d. 4 Tahun | 75 % |
| 5 | Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 4 Tahun s.d. 5 Tahun atau tidak dapat ditemukan lagi alamatnya/usaha tutup/sudah melunasi | 100 % |

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.4.11 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Khusus aset berupa konstruksi diakui pada saat Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over (PHO)*.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi,

perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Belanja dibawah nilai minimum kapitalisasi merupakan beban/belanja tahun berjalan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya, yaitu:

- a. Untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke atas;
- b. Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan Aset Tetap Lainnya sebesar mulai Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke atas, kecuali buku; dan
- c. Buku dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan per kelompok dan jenis buku/judul buku dan tanggal perolehan yang sama.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas. Batas minimal kapitalisasi Aset Tetap diatas, dikecualikan untuk perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap dicatat dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan apabila:

- a. Memperpanjang masa manfaat dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih; atau
- b. Tidak memperpanjang masa manfaat namun kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekadar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas; dan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.

Aset Tetap yang mengalami *overhead*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Persentase Renovasi/Restorasi/Overhead/Perbaikan yang Dapat Menambah Masa Manfaat pada Aset Tetap

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi /Restorasi / <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|----------|---|---------------------------------|
| Bangunan Gedung | | | |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | Renovasi | >75% | 50 |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal | Renovasi | >45% | 15 |
| Monumen | | | |
| Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti | Renovasi | >45% | 15 |
| Bangunan Menara | | | |
| Bangunan Menara Perambuan | Renovasi | >45% | 15 |
| Tugu Titik Kontrol/Prasasti | | | |
| Tugu / Tanda batas | Renovasi | >45% | 15 |
| Jalan dan Jembatan | | | |
| Jalan | Renovasi | >60% | 10 |
| Jembatan | Renovasi | >45% | 15 |
| Bangunan Air | | | |
| Bangunan Air Irigasi | Renovasi | >45% | 10 |
| Bangunan Pengairan Pasang Surut | Renovasi | >45% | 10 |
| Bangunan pengembangan pengembangan | Renovasi | >45% | 5 |
| Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam | | >45% | 3 |
| Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah | Renovasi | >45% | 3 |
| Bangunan Air Bersih/Air Baku | Renovasi | >45% | 15 |
| Bangunan Air Kotor | Renovasi | >45% | 15 |

| Uraian | Jenis | Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|--|----------|---|---------------------------------|
| Instalasi | | | |
| Instalasi Air Bersih/Air baku | Renovasi | >45% | 10 |
| Instalasi Air Kotor | Renovasi | >45% | 10 |
| Instalasi Pengolahan Sampah | Renovasi | >45% | 5 |
| Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | Renovasi | >45% | 5 |
| Instalasi Pembangkit Listrik | Renovasi | >45% | 15 |
| Instalasi Gardu Listrik | Renovasi | >45% | 15 |
| Instalasi Pertahanan | Renovasi | >45% | 5 |
| Instalasi Gas | Renovasi | >45% | 15 |
| Instalasi Pengaman | Renovasi | >45% | 3 |
| Instalasi Lain | Renovasi | >45% | 3 |
| Jaringan | | | |
| Jaringan Air Minum | Overhaul | >45% | 10 |
| Jaringan Listrik | Overhaul | >45% | 15 |
| Jaringan Telepon | Overhaul | >45% | 10 |
| Jaringan Gas | Overhaul | >45% | 10 |
| ASET TETAP DALAM RENOVASI | | | |
| Peralatan dan Mesin dalam Renovasi | Renovasi | >45% | 2 |
| Gedung dan Bangunan dalam Renovasi | Renovasi | >45% | 15 |
| Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi | Renovasi | >45% | 5 |

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|---|---------------------|----------------------|
| 1 | 3 | | | | | ASET TETAP | |
| 1 | 3 | 2 | | | | PERALATAN DAN MESIN | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | | ALAT BESAR | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | ALAT BESAR DARAT | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | TRACTOR | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | GRADER | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | EXCAVATOR | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | PILE DRIVER | 10 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | HAULER | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ASPHALT EQUIPMENT | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | COMPACTING EQUIPMENT | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | LOADER | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ALAT PENGANGKAT | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | MESIN PROSES | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | ALAT BESAR DARAT LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | | ALAT BESAR APUNG | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | DREDGER | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | FLOATING EXCAVATOR | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | AMPHIBI DREDGER | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | KAPAL TARIK | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | MESIN PROSES APUNG | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ALAT BESAR APUNG LAINNYA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | ALAT BANTU | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ALAT PENARIK | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | FEEDER | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | COMPRESSOR | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ELECTRIC GENERATING SET | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | POMPA | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | MESIN BOR | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | MESIN TATOO | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | PERALATAN SELAM | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | PERALATAN SAR MOUNTENERING | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | PERALATAN INTELEJEN | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | ALAT BANTU LAINNYA | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | | | ALAT ANGKUTAN | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | KENDARAAN TEMPUR | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ALAT ANGKUTAN KERETA REL | 7 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|---|--|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | | ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | KAPAL TERBANG | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | | | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | | ALAT BENGKEL BERMESIN | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | PERKAKAS BENGKEL LISTRIK | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | PERKAKAS BENGKEL SERVICE | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | PERKAKAS BENGKEL KAYU | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | PERKAKAS BENGKEL KHUSUS | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | PERALATAN LAS | 5 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | PERKAKAS PABRIK ES | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | PERKAKAS BENGKEL LISTRIK | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | PERKAKAS BENGKEL SERVICE | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | PERKAKAS PENGANGKAT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS) | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS) | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | PERKAKAS BENGKEL KERJA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | PERALATAN TUKANG BESI | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | PERALATAN TUKANG KAYU | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | PERALATAN TUKANG KAYU | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | | ALAT UKUR | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ALAT UKUR UNIVERSAL | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | ALAT KALIBRASI | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | OSCILLOSCOPE | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | UNIVERSAL TESTER | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | ALAT UKUR/PEMBANDING | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | ALAT UKUR LAIN-LAIN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | ALAT TIMBANGAN/BIARA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ANAK TIMBANGAN/BIARA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | TAKARAN KERING | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | TAKARAN BAHAN BANGUNAN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | TAKARAN LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | SPECIFIC SET | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | ALAT UKUR LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | | | ALAT PERTANIAN | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | | ALAT PENGOLAHAN | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN | 1 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|--|----------------------|
| | | | | | | TANAMAN | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | ALAT PANEN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | ALAT PROSESING | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | ALAT PASCA PANEN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | ALAT PRODUKSI PERIKANAN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | ALAT-ALAT PETERNAKAN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | ALAT PENGOLAHAN LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | | ALAT KANTOR | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | MESIN KETIK | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN) | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | ALAT KANTOR LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | | ALAT RUMAH TANGGA | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | MEUBELAIR | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ALAT PENGUKUR WAKTU | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ALAT PEMBERSIH | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ALAT PENDINGIN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ALAT DAPUR | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ALAT PEMADAM KEBAKARAN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | | MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | MEJA KERJA PEJABAT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | MEJA RAPAT PEJABAT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | KURSI KERJA PEJABAT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | KURSI RAPAT PEJABAT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | LEMARI DAN ARSIP PEJABAT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | | | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | | ALAT STUDIO | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | PERALATAN STUDIO AUDIO | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | PERALATAN STUDIO GAMBAR | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | PERALATAN CETAK | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR | 5 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| | | | | | | TANAH | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | ALAT STUDIO LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | | ALAT KOMUNIKASI | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ALAT KOMUNIKASI SOSIAL | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | ALAT-ALAT SANDI | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | ALAT KOMUNIKASI KHUSUS | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIIONAL | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | ALAT KOMUNIKASI SATELIT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | ALAT KOMUNIKASI LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | | PERALATAN PEMANCAR | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | PERALATAN PEMANCAR MF/MW | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | PERALATAN PEMANCAR HF/SW | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | PERALATAN PEMANCAR VHF/FM | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | PERALATAN PEMANCAR UHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | PERALATAN PEMANCAR SHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | PERALATAN ANTENA MF/MW | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | PERALATAN ANTENA HF/SW | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | PERALATAN ANTENA VHF/FM | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | PERALATAN ANTENA UHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 13 | PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 | PERALATAN MICROWAVE F P U | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16 | PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 17 | PERALATAN MICROWAVE TVRO | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | PERALATAN DUMMY LOAD | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 19 | SWITCHER ANTENA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 20 | SWITCHER/MENARA ANTENA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 21 | FEEDER | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 22 | HUMIDITY CONTROL | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 23 | PROGRAM INPUT EQUIPMENT | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 24 | PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 25 | PERALATAN PEMANCAR LF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 26 | UNIT PEMANCAR MF+HF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 27 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 28 | PERALATAN PENERIMA | 10 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 29 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 30 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 31 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 32 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 33 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 34 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 35 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 36 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 37 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 38 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 39 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 40 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 41 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 42 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 43 | PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 44 | PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 45 | PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 46 | PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 47 | SUMBER TENAGA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 48 | PERALATAN PEMANCAR LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | RADAR | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI | 10 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | | | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | | ALAT KEDOKTERAN | |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | ALAT KEDOKTERAN UMUM | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | ALAT KEDOKTERAN GIGI | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | ALAT KEDOKTERAN THT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | ALAT KEDOKTERAN MATA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | ALAT KEDOKTERAN ANAK | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF) | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | ALAT KEDOKTERAN JANTUNG | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 15 | ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 16 | ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 18 | ALAT KEDOKTERAN RADIOTHERAPY | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 19 | ALAT KEDOKTERAN NUKLIR | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 20 | ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 22 | ALAT KEDOKTERAN Jiwa | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 23 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 24 | ALAT KEDOKTERAN I C U | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 25 | ALAT KEDOKTERAN I C C U | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 26 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 27 | ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 28 | ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 29 | ALAT KEDOKTERAN LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | | ALAT KESEHATAN UMUM | |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | ALAT KESEHATAN MATRA LAUT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | ALAT KESEHATAN MATRA UDARA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN | 5 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | ALAT KESEHATAN OLAH RAGA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | | | ALAT LABORATORIUM | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | | UNIT ALAT LABORATORIUM | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | ALAT LABORATORIUM UMUM | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 12 | ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | ALAT LABORATORIUM KIMIA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | ALAT LABORATORIUM PATOLOGI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 | ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 17 | ALAT LABORATORIUM FILM | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 18 | ALAT LABORATORIUM MAKANAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 | ALAT LABORATORIUM FARMASI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 20 | ALAT LABORATORIUM FISIKA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 22 | ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 23 | ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 24 | ALAT LABORATORIUM PASIR | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 25 | ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 26 | ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 27 | ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 28 | ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN | 8 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 29 | ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 30 | ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 31 | ALAT LABORATORIUM METROLOGIE | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 32 | ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 33 | ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 34 | ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 35 | ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 36 | ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 37 | ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 38 | ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 39 | ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 40 | ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 41 | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 42 | ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 43 | ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 44 | ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 45 | ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 46 | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 47 | ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 48 | ALAT LABORATORIUM BIOLOGI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 49 | ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 50 | ALAT LABORATORIUM TAMBANG | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 51 | ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 52 | ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 53 | ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 54 | LABORATORIUM KEARSIPAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 55 | LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 56 | ALAT LABORATORIUM LAIN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 57 | ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN | 8 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| | | | | | | SISTEM PROPULASI | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 58 | ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 59 | ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 60 | ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 61 | ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 62 | ALAT LABORATORIUM POPULASI | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 63 | ALAT PENGUKUR GELOMBANG | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 64 | UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | ANALYTICAL INSTRUMENT | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | INSTRUMENT PROBE/SENSOR | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | GENERAL LABORATORY TOOL | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | LABORATORY SAFETY EQUIPMENT | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 12 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 13 | ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 14 | ALAT PERAGA KEJURUAN | 10 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 15 | ALAT PERAGA PAUD/TK | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 16 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | | ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | RADIATION DETECTOR | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | RECORDER DISPLAY | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | SYSTEM/POWER SUPPLY | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | MEASURING/TESTING DEVICE | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | OPTO ELECTRONICS | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | ACCELERATOR | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | | ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | ALAT KESEHATAN KERJA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | PROTEKSI LINGKUNGAN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | METEOROLOGICAL EQUIPMENT | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | SUMBER RADIASI | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | | RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | RADIATION APPLICATION EQUIPMENT | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | PERALATAN HIDROLOGI | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | LABORATORIUM LINGKUNGAN | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | ALAT LABORATORIUM PENUNJANG | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | | PERALATAN LABORATORIUM | |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|--|----------------------|
| | | | | | | HYDRODINAMICA | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | TOWING CARRIAGE | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | WAVE GENERATOR AND ABSORBER | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | CAVITATION TUNNEL | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | OVERHEAD CRANES | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | PERALATAN UMUM | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 11 | PEMESINAN : PAINTING SHOP | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 13 | PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 14 | MOB | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 15 | PHOTO AND FILM EQUIPMENT | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 | PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | ALAT LABORATORIUM NATIUS | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 11 | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | | | ALAT PERSENJATAAN | |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|---|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | | SENJATA API | |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | SENJATA GENGAM | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | SENJATA PINGGANG | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | SENAPAN MESIN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | M O R T I R | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | ANTI LAPIS BAJA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | ARTILERI MEDAN (ARMED) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | KAVALERI | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | SENJATA LAIN-LAIN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | | PERSENJATAAN NON SENJATA API | |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | ALAT KEAMANAN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | NON SENJATA API | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | | SENJATA SINAR | |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | LASER | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | SENJATA SINAR LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN | |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR) | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | PERALATAN DETEKSI INTEL | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | ALSUS LANTAS | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | ALSUS RESERSE | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | ALSUS DAKTILOSKOPI | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | | | KOMPUTER | |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | | KOMPUTER UNIT | |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | KOMPUTER JARINGAN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | PERSONAL KOMPUTER | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | KOMPUTER UNIT LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | | PERALATAN KOMPUTER | |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | PERALATAN MAINFRAME | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | PERALATAN MINI KOMPUTER | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | PERALATAN JARINGAN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | PERALATAN KOMPUTER LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | | | ALAT EKSPLORASI | |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI | |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|---|---|---|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | OPTIK | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | UKUR/INSTRUMENT | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA | |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | MEKANIK | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | ELEKTRONIK/ELECTRIC | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | MANUAL | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | | | ALAT PENGEBORAN | |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | | ALAT PENGEBORAN MESIN | |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | BOR MESIN TUMBUK | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | BOR MESIN PUTAR | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | | ALAT PENGEBORAN NON MESIN | |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | BANGKA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | PANTEK | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | PUTAR | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | PERALATAN BANTU | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 5 | ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | | | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | | SUMUR | |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | PERALATAN SUMUR MINYAK | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | SUMUR PEMBORAN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | SUMUR LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | | PRODUKSI | |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | R I G | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | PRODUKSI LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | ALAT PENGOLAHAN MINYAK | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | ALAT PENGOLAHAN AIR | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | ALAT PENGOLAHAN STEAM | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 | ALAT PENGOLAHAN WAX | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 5 | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | | | ALAT BANTU EKSPLORASI | |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | | ALAT BANTU EKSPLORASI | |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | MEKANIK | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | ELECTRIC | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | | ALAT BANTU PRODUKSI | |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | PERAWATAN SUMUR | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | TEST UNIT | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | | | ALAT KESELAMATAN KERJA | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | | ALAT DETEKSI | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | RADIASI | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | SUARA | 4 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|---|---|---|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | ALAT DETEKSI LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | | ALAT PELINDUNG | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | BAJU PENGAMAN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | MASKER | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | TOPI KERJA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 4 | SABUK PENGAMAN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 5 | SEPATU LAPANGAN | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | ALAT PELINDUNG LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | | ALAT SAR | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | ALAT PENOLONG | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2 | ALAT PENDUKUNG Pencarian | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | ALAT KERJA BAWAH AIR | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 4 | ALAT SAR LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | | ALAT KERJA Penerbangan | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI Penerbangan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN Penerbangan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 3 | PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 6 | ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 7 | ALAT KERJA Penerbangan LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | | | ALAT PERAGA | |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN | |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | ALAT PERAGA PELATIHAN | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | ALAT PERAGA PERCONTOHAN | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | | | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | | UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI | |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 2 | SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 3 | SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 | SOLID-SOLID CLASSIFIER | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 5 | SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 6 | SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 8 | LEACHING EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 9 | GRAVITY SEDIMENTATION | 5 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|---|----|---|----------------------|
| | | | | | | EQUIPMENT | |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 10 | SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 11 | CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 12 | LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 13 | GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 14 | GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 15 | GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 16 | GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 17 | GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 18 | ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 19 | TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 20 | SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 21 | SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 22 | HEAT GENERATING EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 23 | HEAT TRANSFER EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 24 | MECHANICAL PROCES | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 25 | CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 26 | UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | | | RAMBU – RAMBU | |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT | |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | RAMBU BERSUAR | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | RAMBU TIDAK BERSUAR | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 3 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA | |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | RUNWAY/THRESHOLD LIGHT | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI) | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | APPROACH LIGHT | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS) | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 5 | SIGNAL | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 6 | FLOOD LIGHTS | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 7 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 3 | | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT | |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 3 | 1 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT | 50 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA | 50 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|---|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 19 | | | PERALATAN OLAH RAGA | |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | | PERALATAN OLAH RAGA | |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 2 | PERALATAN PERMAINAN | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | PERALATAN SENAM | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 4 | PERALATAN OLAH RAGA AIR | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 5 | PERALATAN OLAH RAGA UDARA | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 6 | PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA | 4 |
| 1 | 3 | 3 | | | | GEDUNG DAN BANGUNAN | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | | | BANGUNAN GEDUNG | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | BANGUNAN GUDANG | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | BANGUNAN GEDUNG INSTALASI | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | BANGUNAN KESEHATAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | BANGUNAN GEDUNG MUSIUM | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | BANGUNAN RUMAH TAHANAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN | 50 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | BANGUNAN TERBUKA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | BANGUNAN INDUSTRI | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | BANGUNAN FASILITAS UMUM | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33 | BANGUNAN PARKIR | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 34 | BANGUNAN GEDUNG PABRIK | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 | BANGUNAN STASIUN BUS | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | TAMAN | 10 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA | 20 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | RUMAH NEGARA GOLONGAN I | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | RUMAH NEGARA GOLONGAN II | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | RUMAH NEGARA GOLONGAN III | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | ASRAMA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | HOTEL | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | MOTEL | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | FLAT/RUMAH SUSUN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | PANTI ASUHAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | APARTEMEN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | RUMAH TIDAK BERSUSUN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | | | MONUMEN | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | CANDI | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | TUGU | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | BANGUNAN PENINGGALAN | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | | | BANGUNAN MENARA | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | BANGUNAN PERAMBUAN | 40 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|----|---|----------------------|
| | | | | | | PENERANGAN PANTAI | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | BANGUNAN MENARA PENGAWAS | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | | | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | | TUGU/TANDA BATAS | |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | PAGAR | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | TUGU/TANDA BATAS LAINNYA | 50 |
| 1 | 3 | 4 | | | | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | JALAN DAN JEMBATAN | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | | JALAN | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | JALAN NASIONAL | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | JALAN PROPINSI | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | JALAN KABUPATEN | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | JALAN KOTA | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | JALAN DESA | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | JALAN TOL | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | JALAN KERETA API | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | JALAN KHUSUS | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | JALAN LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | | JEMBATAN | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | JEMBATAN PADA JALAN KOTA | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | JEMBATAN PADA JALAN DESA | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | JEMBATAN PADA JALAN TOL | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | JEMBATAN PADA JALAN KERETA API | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | JEMBATAN PENYEBERANGAN | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | JEMBATAN PENGUKUR | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | JEMBATAN LAINNYA | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | BANGUNAN AIR | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | | BANGUNAN AIR IRIGASI | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | BANGUNAN WADUK IRIGASI | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI | 5 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | BANGUNAN SAWAH IRIGASI | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | | BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | BANGUNAN WADUK PASANG SURUT | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | | BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | 3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI | 3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI | 3 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI | 3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI | 3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI | 3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA | 3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | | BANGUNAN AIR KOTOR | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | BANGUNAN WADUK AIR KOTOR | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | | | INSTALASI | |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|---|--|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | | INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | INSTALASI AIR PERMUKAAN | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | INSTALASI AIR TANAH DALAM | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | INSTALASI AIR TANAH DANGKAL | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | | INSTALASI AIR KOTOR | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | | INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM) | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN) | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG) | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 40 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|----|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB) | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | | INSTALASI GARDU LISTRIK | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | | INSTALASI PERTAHANAN | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | | INSTALASI GAS | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | INSTALASI GARDU GAS | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | INSTALASI JARINGAN PIPA GAS | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | INSTALASI PENGOLAHAN GAS | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | INSTALASI GAS LAINNYA | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | | INSTALASI PENGAMAN | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | INSTALASI REAKTOR NUKLIR | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | INSTALASI PENGAMAN LAINNYA | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | | INSTALASI LAIN | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | INSTALASI LAIN | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | | | JARINGAN | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | | JARINGAN AIR MINUM | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | JARINGAN PEMBAWA | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | JARINGAN INDUK DISTRIBUSI | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | JARINGAN CABANG DISTRIBUSI | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | JARINGAN AIR MINUM LAINNYA | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | | JARINGAN LISTRIK | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | JARINGAN TRANSMISI | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | JARINGAN DISTRIBUSI | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | JARINGAN LISTRIK LAINNYA | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | | JARINGAN TELEPON | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | JARINGAN DENGAN MEDIA | 20 |

| Kodefikasi | | | | | | Uraian Barang | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | UDARA | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | JARINGAN TELEPON LAINNYA | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | | JARINGAN GAS | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | JARINGAN PIPA DISTRIBUSI | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | JARINGAN PIPA DINAS | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | JARINGAN BBM | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | JARINGAN GAS LAINNYA | 30 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | | | ASET TETAP DALAM RENOVASI | |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | | ASET TETAP DALAM RENOVASI | |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | ASET TETAP DALAM RENOVASI | 5 |
| 1 | 5 | 3 | | | | ASET TIDAK BERWUJUD | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | | | ASET TIDAK BERWUJUD | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | | ASET TIDAK BERWUJUD | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | LISENSI DAN FRENCHISE | 8 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | HAK CIPTA | 16 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | HAK PATEN | 16 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | SOFTWARE | 4 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | KAJIAN | 20 |

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, barang bercorak kebudayaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, serta barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.4.12 Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset

Tidak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Kelola Serah (BKS), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

Penyerahan kembali objek kerja sama pemanfaatan kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang, yang sebelumnya telah diaudit oleh aparat pengawas fungsional. Atas aset yang telah diserahkan ditetapkan status penggunaannya oleh pejabat yang berwenang.

Khusus untuk ATB, sesuatu diakui sebagai ATB jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakukan akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi;
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*; dan
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *upgrade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

Pengukuran dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset kerjasama dicatat sesuai nilai buku dan akumulasi penyusutannya pada pos aset tetapnya. Aset BSG/BSK dicatat sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan disusutkan sesuai masa kerjasama BSK. Aset BGS/BKS dicatat sebesar nilai aset pada pos Aset Tetap yang diserahkan ke pihak mitra.

Aset yang dikerjakan sama dan disewa disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan pada jenis aset tetap. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian, sebagai berikut:

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai Aset Tetap;
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud meliputi kelompok, sebagai berikut:

- Kelompok I berupa *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
- Kelompok II berupa lisensi dan *franchise*;
- Kelompok III berupa hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan
- Kelompok IV berupa hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama paling tinggi 20 tahun dan tarif, sebagai berikut:

Tabel 4.4. Penghitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat | Tarif |
|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Kelompok 1 | 4 Tahun/sesuai lisensi | 25% sesuai lisensi |
| Kelompok 2 | 8 Tahun | 12,50% |
| Kelompok 3 | 16 Tahun | 6,25% |
| Kelompok 4 | 20 Tahun | 5% |

Aset Tetap yang telah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan dan disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatatnya (*carrying amount*).

4.4.13 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban antara lain sebagai berikut:

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;

- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- d. Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- f. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan suatu ketentuan/perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut; dan
- i. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas disajikan di Neraca setelah akun Kewajiban. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Belum ada penerapan kebijakan akuntansi tertentu.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1.1 PENDAPATAN - LRA

Anggaran Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2022 adalah sebesar Rp1.090.512.850.566,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau TA 2022. Target pendapatan daerah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp1.060.499.402.627,54 atau 97,25%. Komposisi pencapaian realisasi per kelompok pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan Daerah LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | 130.040.931.172,00 | 104.399.965.189,33 | 80,28 | 128.297.636.758,39 |
| Pendapatan Transfer | 960.471.919.394,00 | 956.099.437.438,21 | 99,54 | 798.265.268.434,30 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.393.500.000,00 |
| Jumlah | 1.090.512.850.566,00 | 1.060.499.402.627,54 | | 955.956.405.192,69 |

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.060.499.402.627,54 atau 97,25% dari anggaran sebesar Rp1.090.512.850.566,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.542.997.434,85 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp955.956.405.192,69 atau turun 10,94%.

a. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran dan realisasi PAD TA 2022 serta realisasi PAD TA 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2. Realisasi PAD LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Pajak Daerah | 64.846.946.287,00 | 50.387.265.416,00 | 77,7 | 39.064.581.076,00 |
| Retribusi Daerah | 13.098.000.000,00 | 5.758.970.894,00 | 43,97 | 5.207.620.310,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.440.000.000,00 | 2.437.443.567,98 | 99,9 | 2.230.523.344,23 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 49.655.984.885,00 | 45.816.285.311,35 | 92,26 | 81.794.912.028,16 |
| Jumlah | 130.040.931.172,00 | 104.399.965.189,33 | 80,28 | 128.297.636.758,39 |

Realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp104.399.965.189,33 atau 80,28% dari anggaran sebesar Rp130.040.931.172,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.897.671.569,06 atau 18,63% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp128.297.636.758,39.

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah diantaranya termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola oleh RSUD Siti Aisyah dan Badan Diklat, dan

Pendapatan Dana Kapitasi untuk Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP/Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPD terkait sebagai unit penghasil. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA

| Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Pajak Hotel | 4.000.000.000,00 | 3.067.238.292,00 | 76,68 | 2.334.256.114,00 |
| Pajak Restoran | 9.150.000.000,00 | 7.905.265.203,00 | 86,40 | 6.532.486.896,00 |
| Pajak Hiburan | 3.250.000.000,00 | 2.176.825.340,00 | 66,98 | 1.156.901.605,00 |
| Pajak Reklame | 4.260.000.000,00 | 4.260.156.264,00 | 100,00 | 3.501.298.322,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 14.850.000.000,00 | 15.050.710.162,00 | 101,35 | 13.825.227.656,00 |
| Pajak Parkir | 920.000.000,00 | 1.073.202.661,00 | 116,65 | 751.686.993,00 |
| Pajak Air Tanah | 300.000.000,00 | 257.313.349,00 | 85,77 | 246.176.301,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 280.000.000,00 | 226.688.000,00 | 80,96 | 228.672.000,00 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 3.700.000.000,00 | 3.438.564.233,00 | 92,93 | 1.825.343.357,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 9.000.000.000,00 | 3.786.003.432,00 | 42,07 | 3.693.401.627,00 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 15.136.946.287,00 | 9.145.298.480,00 | 60,42 | 4.969.130.205,00 |
| Jumlah | 64.846.946.287,00 | 50.387.265.416,00 | 77,70 | 39.064.581.076,00 |

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp50.387.265.416,00 atau 77,70% dari anggaran sebesar Rp64.846.946.287,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.322.684.340,00 atau 28,98% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp39.064.581.076,00. Adapun uraian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebagai berikut:

- a) Realisasi pendapatan Pajak Hotel TA 2022 sebesar Rp3.067.238.292,00 atau 76,68% dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 yang berasal dari penerimaan pajak hotel sebesar Rp2.926.257.345,00, pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebesar Rp112.950.347,00, dan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebesar Rp28.030.600,00;
- b) Realisasi pendapatan Pajak Restoran TA 2022 sebesar Rp7.905.265.203,00 atau 86,40% dari anggaran sebesar Rp9.150.000.000,00 yang berasal dari penerimaan pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp4.173.161.402,00 pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp2.991.562.062,00, pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp501.475.806,00, pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp3.365.630,00 dan pajak jasa boga dan sejenisnya sebesar Rp235.700.303,00;

- c) Realisasi pendapatan Pajak Hiburan TA 2022 sebesar Rp2.176.825.340,00 atau 66,98% dari anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00 yang berasal dari tontonan film/bioskop sebesar Rp742.107.767,00; pajak pagelaran kesenian/music/tari/busana sebesar Rp14.547.750,00 pajak diskotik, karaoke, kelab malam dan sejenisnya sebesar Rp546.692.730,00; pajak permainan biliard dan bowling sebesar Rp21.250.250,00; pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp518.834.298,00, dan pajak panti pijat, refleksi mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar Rp33.392.545,00;
- d) Realisasi pendapatan Pajak Reklame TA 2022 sebesar Rp4.260.156.264,00 atau 100,00,% dari anggaran sebesar Rp4.260.000.000,00 yang berasal dari pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron* sebesar Rp3.906.404.114,00, reklame kain sebesar Rp276.110.044,00, reklame melekat/stiker sebesar Rp6.881.700,00 reklame selebaran sebesar Rp30.218.415,00, dan reklame berjalan sebesar Rp40.541.991,00;
- e) Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2022 sebesar Rp15.050.710.162,00 atau 101,35% dari anggaran sebesar Rp14.850.000.000,00 yang berasal dari PPJ sumber lain sebesar Rp15.050.710.162,00;
- f) Realisasi pendapatan Pajak Parkir TA 2022 sebesar Rp1.073.202.661,00 atau 116,65% dari anggaran sebesar Rp920.000.000,00;
- g) Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah TA 2022 sebesar Rp257.313.349,00 atau 85,77% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00;
- h) Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 Rp226.688.000,00 atau 80,96% dari anggaran Rp280.000.000,00;
- i) Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2022 sebesar Rp3.438.564.233,00 atau 92,93% dari anggaran sebesar Rp3.700.000.000,00 yang berasal dari pajak pasir dan kerikil sebesar Rp1.394.049.286, pajak tanah liat sebesar Rp59.983.906,00 dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp1.984.531.041,00;
- j) Realisasi pendapatan PBB P2 TA 2022 sebesar Rp3.786.003.432,00 atau 42,07% dari anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00; dan
- k) Realisasi pendapatan BPHTB TA 2022 sebesar Rp9.145.298.480,00 atau 60,42% dari anggaran sebesar Rp15.136.946.287,00 yang berasal dari BPHTB pemindahan hak sebesar Rp8.451.459.665,00 dan BPHTB pemberian hak baru sebesar Rp693.838.927,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPD terkait sebagai unit penghasil. Anggaran dan realisasi Pendapatan

Retribusi Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.4. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA

| Uraian | Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | % | Realisasi 2021 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Retribusi Jasa Umum | 8.208.000.000,00 | 3.929.587.501,00 | 34,04 | 3.640.892.310,00 |
| Retribusi Jasa Usaha | 3.490.000.000,00 | 1.187.885.000,00 | 45,82 | 1.353.356.000,00 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | 1.400.000.000,00 | 641.498.393,00 | 45,82 | 213.372.000,00 |
| Jumlah | 13.098.000.000,00 | 5.758.970.894,00 | 43,97 | 5.207.620.310,00 |

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp5.758.970.894,00 atau 43,97% dari anggaran sebesar Rp13.098.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp551.350.584,00 atau 10,59% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp5.207.620.310,00. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan jenis retribusi yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Lubuklinggau TA 2022 dan realisasi TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.5. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 480.000.000,00 | 404.960.461,00 | 84,37 | 112.818.100,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.370.000.000,00 | 581.580.000,00 | 42,45 | 604.403.500,00 |
| Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat | 108.000.000,00 | 1.350.000,00 | 1,25 | 4.200.000,00 |
| Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.600.000.000,00 | 700.587.000,00 | 43,79 | 667.269.000,00 |
| Retribusi Pelataran | 950.000.000,00 | 477.349.000,00 | 50,25 | 554.731.000,00 |
| Retribusi Los | 300.000.000,00 | 1.440.000,00 | 0,48 | 33.752.000,00 |
| Retribusi Kios | 300.000.000,00 | 8.823.350,00 | 2,94 | 13.628.000,00 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1.400.000.000,00 | 853.850.000,00 | 60,99 | 901.525.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran | 440.000.000,00 | 106.328.250,00 | 24,17 | 106.727.850,00 |
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 175.000.000,00 | 13.500.000,00 | 7,71 | 13.750.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 500.000.000,00 | 507.266.000,00 | 101,45 | 315.792.000,00 |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 585.000.000,00 | 272.553.440,00 | 46,59 | 312.295.860,00 |
| Jumlah | 8.208.000.000,00 | 3.929.587.501,00 | 47,88 | 3.640.892.310,00 |

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022 sebesar Rp3.929.587.501,00 atau 47,88% dari anggaran sebesar Rp8.208.200.000,00. Realisasi tersebut naik sebesar Rp288.695.191,00 atau 7,93% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.640.892.310,00.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis retribusi yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Retribusi Pemakaian Ruangan | 360.000.000,00 | 15.000.000,00 | 4,17 | 15.000.000,00 |
| Retribusi Pemakaian Alat | 185.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | 1.500.000.000,00 | 826.800.000,00 | 55,12 | 960.968.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 980.000.000,00 | 259.671.000,00 | 26,50 | 276.851.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 390.000.000,00 | 77.000.000,00 | 19,74 | 75.120.000,00 |
| Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 75.000.000,00 | 9.414.000,00 | 12,55 | 19.417.000,00 |
| Jumlah | 3.490.000.000,00 | 1.187.885.000,00 | 34,04 | 1.353.356.000,00 |

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 sebesar Rp1.187.885.000,00 atau 34,04% dari anggaran sebesar Rp3.490.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp165.471.000,00 atau 12,23% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.353.356.000,00.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan jenis retribusi yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 sebesar Rp641.498.393,00 atau 45,82% dari anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp428.126.393,000,00 atau 200,65% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp213.372.000,00.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non

Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau.

TA 2022 Pemerintah Kota Lubuklinggau menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.440.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.437.443.567,98 atau 99,90%. Anggaran dan realisasi tersebut merupakan dividen atas bagian laba dari PT Bank Sumsel Babel yang menjadi hak Pemerintah Kota Lubuklinggau.

TA 2021 realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PT Bank Sumsel Babel adalah sebesar Rp2.230.523.344,23. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp206.920.223,75 atau 9,28% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

Realisasi penerimaan tersebut merupakan dividen Tahun 2021 yang baru diterima pada tahun 2021 setelah Laporan Keuangan BUMD Tahun 2021 yang terkait selesai diaudit oleh akuntan publik dan telah disetujui serta disahkan dalam RUPS Perseroan pada tahun 2022.

4) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| Hasil Sewa BMD | 0,00 | 325.540.000,00 | 0,00 | 248.275.600,00 |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya | 0,00 | 273.272.649,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jasa Giro pada Kas Daerah | 950.000.000,00 | 587.610.837,00 | 61,85 | 331.396.811,00 |
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 50.000.000,00 | 89.883.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 1.230.000.000,00 | 613.012.032,12 | 49,84 | 52.534.247,00 |
| a. Rekening Deposito Pada Bank Sumsel Babel | 0,00 | 376.402.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Rekening Deposito Pada Bank BNI | 0,00 | 99.280.823,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Rekening Deposito Pada Bank Mandiri | 0,00 | 137.328.767,12 | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 100.000.000,00 | 61.878.040,00 | 61,88 | 44.276.970,00 |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 1.676.495.742,07 | 0,00 | 23.982.197,00 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 800.000.000,00 | 518.422.598,16 | 64,60 | 1.058.708.110,66 |

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Pendapatan Denda Pajak Hotel | 18.000.000,00 | 7.781.268,00 | 43,23 | 32.734.280,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Motel | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 22.887,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 78.100,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya | 5.000.000,00 | 835.780,00 | 16,72 | 217.500,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 1.000.000,00 | 181.400,00 | 18,14 | 166.400,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 12.000.000,00 | 1.385.767,00 | 11,55 | 22.694.160,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 7.000.000,00 | 7.882.646,00 | 112,61 | 17.732.542,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya | 3.000.000,00 | 2.663.828,00 | 88,79 | 8.253.588,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya | 3.000.000,00 | 85.500,00 | 2,85 | 38.000,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076.606,00 |
| Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 2.000.000,00 | 1.850.781,00 | 92,54 | 5.400,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 5.000.000,00 | 448.042,00 | 8,96 | 1.463.712,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 0,00 | 9.170,00 | 0,00 | 2.515.109,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,18 | 18.480,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 0,00 | 1.295.320,00 | 0,00 | 276.330,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron | 65.000.000,00 | 86.793.581,00 | 133,53 | 57.685.131,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain | 20.000.000,00 | 2.226.942,00 | 11,13 | 793.075,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker | 2.000.000,00 | 345.780,00 | 17,29 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran | 2.000.000,00 | 609.000,00 | 30,45 | 140.027,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan | 2.000.000,00 | 57.456,00 | 2,87 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir | 6.000.000,00 | 1.901.448,00 | 31,69 | 3.474.256,00 |

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 5.000.000,00 | 1.012.182,00 | 20,24 | 2.814.682,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet | 5.000.000,00 | 967.680,00 | 19,35 | 3.689.600,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil | 5.000.000,00 | 459.340,00 | 9,19 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.645,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya | 2.000.000,00 | 0,00 | 38,28 | 382.812,00 |
| Pendapatan Denda PBBP2 | 65.000.000,00 | 103.194.408,00 | 158,76 | 87.660.108,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 350.000.000,00 | 36.139.204,00 | 10,33 | 442.111.171,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa | 100.000.000,00 | 585.154,00 | 0,59 | 226.218.400,00 |
| Pendapatan BLUD | 34.782.984.885,00 | 32.777.485.633,00 | 94,23 | 69.691.173.466,50 |
| Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 10.795.000.000,00 | 8.627.623.035,00 | 79,92 | 9.427.051.250,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.184.375,00 |
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 130.000.000,00 | 6.350.000,00 | 4,88 | 0,00 |
| Jumlah | 49.655.984.885,00 | 45.816.285.311,35 | 92,26 | 81.794.912.028,16 |

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp45.816.285.311,35 atau 92,26% dari anggaran sebesar Rp49.655.984.885,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp35.980.271.420,81 atau 43,99% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp81.794.912.028,16.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau selama TA 2022 bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer dari Pemerintah Provinsi. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 serta realisasi TA 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.8. Realisasi Pendapatan Transfer LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 796.789.624.981,00 | 806.854.254.743,00 | 101,26 | 689.461.712.478,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 163.682.294.413,00 | 149.245.182.695,21 | 91,18 | 108.803.555.956,30 |
| Jumlah | 960.471.919.394,00 | 956.099.437.438,21 | 99,54 | 798.265.268.434,30 |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari dua jenis Pendapatan Transfer hanya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai target yang dianggarkan.

Sementara itu Pendapatan Transfer Antar daerah (Provinsi Sumatera Selatan) TA 2022 tidak mencapai target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp956.099.437.438,21 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp960.471.919.394,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp157.834.169.003,91 atau 19,77% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp798.265.268.434,30 rincian Pendapatan Transfer TA 2022 sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.9. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 189.037.261.981,00 | 214.461.763.269,00 | 113,45 | 107.023.311.835,00 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 441.802.413.000,00 | 439.939.564.584,00 | 99,58 | 441.802.413.000,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 42.988.103.000,00 | 40.545.121.203,00 | 94,32 | 57.058.049.834,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 95.220.881.000,00 | 84.166.839.687,00 | 88,39 | 59.142.962.809,00 |
| Dana Insentif Daerah (DID) | 27.740.966.000,00 | 27.740.966.000,00 | 100,00 | 24.434.975.000,00 |
| Jumlah | 796.789.624.981,00 | 806.854.254.743,00 | 101,26 | 689.461.712.478,00 |

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari kelima jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp806.854.254.743,00 atau 101,26% dari anggaran sebesar Rp796.789.624.981,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp117.392.542.265,00 atau 17,03 % dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp689.461.712.478,00. Rincian Pendapatan Transfer TA 2021 sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.10. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 5.136.703.430,00 | 5.794.952.675,00 | 112,81 | 6.005.953.804,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 9.865.944.952,00 | 9.623.672.000,00 | 97,54 | 11.271.495.213,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/W/POPDN | 1.022.002.490,00 | 399.215.335,00 | 39,06 | 315.760.000,00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 1.476.463,00 | 1.476.463,00 | 100,00 | 1.130.615,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 11.938.591.792,00 | 16.993.212.433,00 | 142,34 | 4.729.799.700,00 |

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 70.386.994.945,00 | 70.121.297.912,00 | 99,62 | 42.248.444.175,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | (125.028.359,00) | 512.051.000,00 | (409,55) | 499.541.384,00 |
| Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 86.508.014.201,00 | 106.539.850.460,00 | 123,16 | 37.627.919.016,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 2.517.723.991,00 | 2.517.723.991,00 | 100,00 | 2.965.648.778,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.784.838.076,00 | 1.958.311.000,00 | 109,72 | 1.357.619.150,00 |
| Jumlah | 189.037.261.981,00 | 214.461.763.269,00 | 113,45 | 107.023.311.835,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp214.461.763.269,00 atau 113,45% dari anggaran sebesar Rp189.037.261.981,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp107.438.451.434,00 atau 100,39% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp107.023.311.835,00.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran transfer Pemerintah Pusat – DAU TA 2022 sebesar Rp441.802.413.000,00 dan realisasi sebesar Rp439.939.564.584,00 atau 99,58%. Adapun realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp441.802.413.000,00, Realisasi DAU TA 2022 menurun sebesar Rp1.862.848.416,00 atau 0,42% jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2021.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat – DAK Fisik TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.11. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 200.676.000,00 | 192.984.145,00 | 103,99 | 335.450.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 10.360.988.000,00 | 10.333.904.392,00 | 100,26 | 17.179.703.845,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 2.461.439.000,00 | 2.184.882.605,00 | 112,66 | 7.251.640.500,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.030.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 15.101.854.000,00 | 3.021.474.055,00 | 499,82 | 4.432.810.683,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 3.754.604.000,00 | 3.194.699.225,00 | 117,53 | 2.574.778.566,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 0,00 | 1.514.475.026,00 | 0,00 | 0,00 |

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 0,00 | 953.252.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata | 0,00 | 2.034.165.446,00 | 0,00 | 8.115.971.016,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK) | 0,00 | 3.661.497.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas | 0,00 | 2.383.889.074,00 | 0,00 | 1.562.676.460,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB) | 0,00 | 469.817.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | 1.237.500.000,00 | 1.182.102.600,00 | 104,69 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | 0,00 | 36.754.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB | 1.039.023.000,00 | 995.607.105,00 | 104,36 | 636.026.700,00 |
| DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.974.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.997.500,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.553.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 5.027.725.000,00 | 5.017.415.000,00 | 100,21 | 6.846.055.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217.528.900,00 |
| DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | 3.804.294.000,00 | 3.368.200.000,00 | 112,95 | 1.213.396.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393.641.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.816.664,00 |
| Jumlah | 42.988.103.000,00 | 40.545.121.203,00 | 94,32 | 57.058.049.834,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DAK Fisik TA 2022 sebesar Rp40.545.121.203,00 atau 94,32% dari anggaran sebesar Rp42.988.103.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.512.928.631,00 atau 28,94% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp57.058.049.834,00.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat – DAK Non Fisik TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.12. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik- LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| DAK Non Fisik-TPG PNSD | 42.194.266.000,00 | 37.119.646.395,00 | 87,97 | 45.368.045.000,00 |
| DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 1.575.000.000,00 | 1.575.000.000,00 | 100,00 | 528.000.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOP PAUD | 1.905.600.000,00 | 1.830.609.000,00 | 96,06 | 1.986.000.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 373.200.000,00 | 373.200.000,00 | 100,00 | 876.350.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 7.857.424.000,00 | 4.704.416.901,00 | 59,87 | 6.180.065.013,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Reguler | 35.610.200.000,00 | 33.633.141.427,00 | 94,45 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 640.000.000,00 | 640.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan | 242.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 2.903.301.000,00 | 2.529.120.780,00 | 87,11 | 1.809.778.655,00 |
| DAK Non Fisik-PK2UKM | 404.200.000,00 | 344.148.000,00 | 85,14 | 340.682.000,00 |
| DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.903.141,00 |
| DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 364.955.000,00 | 359.498.000,00 | 98,50 | 326.122.000,00 |
| DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 451.800.000,00 | 359.659.184,00 | 79,61 | 250.017.000,00 |
| DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 698.400.000,00 | 698.400.000,00 | 100,00 | 490.000.000,00 |
| Jumlah | 95.220.881.000,00 | 84.166.839.687,00 | 88,39 | 59.142.962.809,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DAK Non Fisik TA 2022 sebesar Rp84.166.839.687,00 atau 88,39% dari anggaran sebesar Rp95.220.881.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp25.023.876.878,00 atau 42,31% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp59.142.962.809,00.

e) Dana Insentif Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 sebesar Rp27.740.966.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp27.740.966.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.305.991.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp24.434.975.000,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan transfer dari Provinsi Sumatera Selatan untuk bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan. Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 sebesar Rp163.682.294.413,00 dengan realisasi sebesar Rp149.245.182.695,21 atau 91,18%. Adapun realisasi Pendapatan Transfer antar daerah TA 2021 adalah sebesar Rp108.803.555.956,30 sehingga terdapat kenaikan realisasi TA 2022 sebesar Rp40.441.626.738,91 atau 37,17% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Adapun rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 sebagai berikut:

1) Pendapatan bagi hasil pajak

Realisasi Pendapatan bagi hasil pajak TA 2022 sebesar Rp71.809.655.895,21 atau 83,41% dari anggaran sebesar Rp86.097.294.413,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.617.047.681,00 atau 13,64% jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp63.192.608.214,00.

Tabel 5.13. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 14.289.598.923,00 | 13.305.861.083,00 | 93,12 | 13.001.244.938,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air | 0,00 | 11.563,00 | 0,00 | 303.762,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 12.962.931.514,00 | 11.624.039.016,00 | 89,67 | 11.161.290.471,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.353,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 41.830.177.318,00 | 32.690.040.275,51 | 78,15 | 27.570.498.706,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 175.351.579,00 | 148.161.220,00 | 84,49 | 155.711.226,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.689,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.820,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 16.839.235.079,00 | 14.041.542.737,70 | 83,39 | 15.482.925.266,30 |
| Jumlah | 86.097.294.413,00 | 71.809.655.895,21 | 83,41 | 67.373.158.231,30 |

2) Bantuan Keuangan

Anggaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2022 adalah sebesar Rp77.585.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp77.435.526.800,00 atau 99,81,%. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 tersebut merupakan realisasi atas bantuan keuangan bersifat khusus dan bantuan keuangan Pemerintah dalam rangka pembangunan Infrastruktur.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2022 masing-masing sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi TA 2021 sebesar Rp29.393.500.000,00.

5.1.1.2 BELANJA DAN TRANSFER – LRA

Anggaran belanja dan transfer bantuan keuangan merupakan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. TA 2022 Pemerintah Kota Lubuklinggau menganggarkan belanja daerah dan transfer sebesar Rp1.223.959.581.971,00 dengan realisasi sebesar Rp1.162.820.849.448,20 atau 95,00%. Adapun realisasi belanja daerah dan transfer TA 2021 adalah sebesar Rp948.463.242.185,50. Dengan demikian terjadi kenaikan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp214.357.607.262,70 atau 22,60% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14. Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Operasi | 785.887.405.718,00 | 733.970.779.361,20 | 93,39 | 616.328.781.044,50 |
| Belanja Modal | 435.128.820.738,00 | 428.202.927.087,00 | 98,41 | 331.394.237.141,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 2.943.355.515,00 | 647.143.000,00 | 21,99 | 740.224.000,00 |
| Belanja Transfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.223.959.581.971,00 | 1.162.820.849.448,20 | 95,00 | 948.463.242.185,50 |

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Rincian Belanja Operasi TA 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Pegawai | 378.388.697.309,00 | 359.220.909.073,00 | 94,93 | 346.392.440.564,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 357.757.835.303,00 | 325.350.180.851,20 | 90,94 | 257.384.866.728,50 |
| Belanja Bunga | 7.316.384.450,00 | 7.315.243.513,00 | 99,98 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 38.945.988.656,00 | 38.608.945.924,00 | 99,13 | 12.486.473.752,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 3.478.500.000,00 | 3.475.500.000,00 | 99,91 | 65.000.000,00 |
| Jumlah | 785.887.405.718,00 | 733.970.779.361,20 | 93,39 | 616.328.781.044,50 |

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp785.887.405.718,00 dengan realisasi sebesar Rp733.970.779.361,20 atau 93,39%. Realisasi Belanja Operasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp117.641.998.316,70 atau 19,09% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp616.328.781.044,50. Adapun rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 278.432.146.069,00 | 261.777.670.729,00 | 94,02 | 250.621.576.361,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 13.042.085.373,00 | 12.561.164.308,00 | 96,31 | 5.573.282.180,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 49.096.970.131,00 | 45.999.735.303,00 | 93,69 | 49.516.432.231,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 16.829.255.902,00 | 16.561.683.707,00 | 98,41 | 19.882.481.192,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 525.420.306,00 | 453.954.149,00 | 86,40 | 373.103.350,00 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 651.600.000,00 | 357.850.000,00 | 54,92 | 366.000.000,00 |
| Belanja Pegawai BOS | 6.321.303.000,00 | 8.125.524.696,00 | 128,54 | 6.121.303.000,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 13.489.916.528,00 | 13.383.326.181,00 | 99,21 | 13.938.262.250,00 |
| Jumlah | 378.388.697.309,00 | 359.220.909.073,00 | 94,93 | 346.392.440.564,00 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran untuk Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp378.388.697.309,00 dengan realisasi sebesar Rp359.220.909.073,00 atau 94,93%. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.828.468.509,00 atau 3,70% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp346.392.440.564,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Belanja Barang Pakai Habis | 54.807.817.829,00 | 51.733.778.217,00 | 94,39 | 52.210.477.460,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 61.912.572.373,00 | 57.683.737.829,00 | 93,17 | 58.048.601.636,00 |
| Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 22.150.010.200,00 | 21.100.120.700,00 | 95,26 | 6.971.161.259,00 |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 1.704.938.696,00 | 1.556.000.970,00 | 91,26 | 1.856.946.619,00 |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 2.478.895.850,00 | 2.233.013.750,00 | 90,08 | 1.522.889.000,00 |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 51.350.000,00 | 51.350.000,00 | 100,00 | 7.000.000,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 10.411.836.042,00 | 10.277.849.754,00 | 98,71 | 7.760.311.935,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 803.150.000,00 | 606.100.250,00 | 75,47 | 141.533.220,00 |

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 2.157.926.500,00 | 2.107.279.000,00 | 97,65 | 4.423.806.700,00 |
| Belanja Pemeliharaan Tanah | 455.400.000,00 | 454.434.000,00 | 99,79 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.317.655.434,00 | 5.011.299.873,00 | 94,24 | 6.371.988.599,00 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 3.033.294.328,00 | 3.006.428.238,00 | 99,11 | 19.229.319.837,00 |
| Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.190.944.000,00 | 1.111.272.427,00 | 93,31 | 1.646.430.650,00 |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 50.905.193.903,00 | 42.498.605.330,00 | 83,49 | 93.725.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 62.910.761.364,00 | 60.223.134.915,00 | 95,73 | 44.348.770.547,00 |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 840.671.000,00 | 826.968.000,00 | 98,37 | 622.200.000,00 |
| Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 574.285.000,00 | 559.144.775,00 | 97,36 | 78.280.000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOS | 17.968.241.211,00 | 12.879.660.660,00 | 71,68 | 14.186.429.295,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD | 58.082.891.573,00 | 51.430.002.163,20 | 88,55 | 37.864.994.971,50 |
| Jumlah | 357.757.835.303,00 | 325.350.180.851,20 | 90,94 | 257.384.866.728,50 |

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp357.757.835.303,00 dengan realisasi sebesar Rp325.350.180.851,20 atau 90,94%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 naik sebesar Rp67.965.314.122,70 atau 26,41% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp257.384.866.728,50

Dari realisasi belanja barang dan jasa tersebut, sebesar Rp32.425.483.080,00 merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang seharusnya dianggarkan dalam belanja modal.

3) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga TA 2022 sebesar Rp7.315.243.513,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp7.316.384.450,00 merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

4) Belanja Hibah

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 11.110.000.000,00 | 10.922.459.550,00 | 98,31 | 0,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 27.338.397.056,00 | 27.188.894.774,00 | 99,45 | 11.988.882.152,00 |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 497.591.600,00 | 497.591.600,00 | 100,00 | 497.591.600,00 |
| Jumlah | 38.945.988.656,00 | 38.608.945.924,00 | 99,13 | 12.486.473.752,00 |

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp38.945.988.656,00 dengan realisasi sebesar Rp38.608.945.924,00 atau 99,13%. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 lebih mengalami kenaikan sebesar Rp26.122.472.172,00 atau 209,21% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp12.486.473.752,00

5) Belanja Bantuan Sosial

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | 100,00 | 65.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 3.203.000.000,00 | 3.200.000.000,00 | 99,91 | 0,00 |
| Jumlah | 3.478.500.000,00 | 3.475.500.000,00 | 99,91 | 65.000.000,00 |

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp3.478.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.475.500.000,00 atau 99,91%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.410.500.000,00 atau 5.246,92% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp65.000.000,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 serta realisasi TA 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| Belanja Modal Tanah | 10.650.771.229,00 | 8.322.213.959,00 | 78,14 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 28.943.761.617,00 | 25.905.888.028,00 | 89,50 | 34.974.246.850,00 |

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 48.242.540.762,00 | 47.779.448.452,00 | 99,04 | 59.810.307.168,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 337.656.649.839,00 | 336.645.742.957,00 | 99,70 | 228.810.890.667,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 9.635.097.291,00 | 9.549.633.691,00 | 99,11 | 7.798.792.456,00 |
| Jumlah | 435.128.820.738,00 | 428.202.927.087,00 | 98,41 | 331.394.237.141,00 |

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp435.128.820.738,00 dengan realisasi sebesar Rp428.202.927.087,00 atau 98,41%. Realisasi Belanja Modal TA 2022 naik sebesar Rp96.808.689.946,00 atau 29,21% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp331.394.237.141,00. Adapun rincian Belanja Modal, sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp10.650.771.229,00 dengan realisasi sebesar Rp8.322.213.959,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 naik sebesar Rp8.322.213.959,00 atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Belanja Modal Alat Besar Darat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.403.460,00 |
| Belanja Modal Alat Bantu | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181.799.380,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 2.506.010.000,00 | 1.973.776.097,00 | 78,76 | 3.500.750.000,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 32.500.000,00 | 16.085.000,00 | 49,49 | 47.555.000,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | 18.793.300,00 | 15.806.500,00 | 84,11 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Ukur | 10.480.000,00 | 6.293.700,00 | 60,05 | 2.190.635.400,00 |
| Belanja Modal Alat Pengolahan | 10.697.000,00 | 10.697.000,00 | 100,00 | 180.000,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor | 132.470.000,00 | 131.080.600,00 | 98,95 | 5.715.962.150,00 |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 3.053.750.375,00 | 2.934.287.862,00 | 96,09 | 2.622.406.265,00 |
| Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 1.571.170.200,00 | 1.557.492.920,00 | 99,13 | 518.221.950,00 |
| Belanja Modal Alat Studio | 1.374.779.000,00 | 1.374.269.000,00 | 99,96 | 865.688.000,00 |
| Belanja Modal Alat Komunikasi | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 | 126.838.575,00 |

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Modal Peralatan Pemancar | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi | 10.000.000,00 | 9.350.000,00 | 93,50 | 9.000.000,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran | 38.680.000,00 | 23.410.000,00 | 60,52 | 4.500.000,00 |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 7.447.266.937,00 | 6.675.020.068,00 | 89,63 | 10.442.322.223,00 |
| Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 245.009.990,00 | 14.850.000,00 | 6,06 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | | | 0,00 | 269.930.000,00 |
| Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 29.690.000,00 | 11.500.000,00 | 38,73 | 14.450.000,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 1.296.867.000,00 | 1.296.867.000,00 | 100,00 | 347.473.000,00 |
| Belanja Modal Komputer Unit | 4.494.113.490,00 | 4.303.593.139,00 | 95,76 | 1.897.281.379,50 |
| Belanja Modal Peralatan Komputer | 4.221.871.500,00 | 4.142.349.307,00 | 98,12 | 1.468.501.477,50 |
| Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika | 628.920.825,00 | 548.800.785,00 | 87,26 | 2.277.193.690,00 |
| Belanja Modal Alat Pelindung | 66.500.000,00 | 35.900.000,00 | 53,98 | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 45.400.000,00 | 40.171.000,00 | 88,48 | 429.240.900,00 |
| Belanja Modal Sumur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.214.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.692.500.000,00 | 770.888.050,00 | 45,55 | 0,00 |
| Jumlah | 28.943.761.617,00 | 25.905.888.028,00 | 89,50 | 34.974.246.850,00 |

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp28.943.761.617,00 dengan realisasi sebesar Rp25.905.888.028,00 atau 89,50%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 menurun sebesar Rp9.068.358.822,00 atau 25,93% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp34.974.246.850,00.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 38.297.382.462,00 | 38.059.415.352,00 | 99,38 | 56.862.459.168,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 5.846.483.800,00 | 5.837.085.700,00 | 99,84 | 92.344.800,00 |
| Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 3.949.910.500,00 | 3.735.748.000,00 | 94,58 | 2.855.503.200,00 |
| Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 148.764.000,00 | 147.199.400,00 | 98,95 | 0,00 |
| Jumlah | 48.242.540.762,00 | 47.779.448.452,00 | 99,04 | 59.810.307.168,00 |

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp48.242.540.762,00 dengan realisasi sebesar Rp47.779.448.452,00 atau 99,04%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 menurun sebesar Rp12.030.858.716,00 atau 20,12% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp59.810.307.168,00.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Belanja Modal Jalan | 233.596.547.347,00 | 233.446.398.447,00 | 99,94 | 121.849.171.131,00 |
| Belanja Modal Jembatan | 50.936.621.510,00 | 50.930.347.910,00 | 99,99 | 39.346.628.100,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 7.299.625.000,00 | 7.285.212.200,00 | 99,80 | 5.859.045.000,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut | 18.668.480.000,00 | 18.639.155.000,00 | 99,84 | 8.949.315.000,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 9.322.194.900,00 | 9.308.927.800,00 | 99,86 | 15.939.714.052,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 10.673.594.200,00 | 10.667.138.300,00 | 99,94 | 33.057.558.484,00 |
| Belanja Modal Instalasi Lain | 87.917.500,00 | 87.917.500,00 | 100,00 | 25.000.000,00 |
| Belanja Modal Jaringan Air Minum | 1.175.625.000,00 | 1.170.227.600,00 | 99,54 | 1.195.653.900,00 |
| Belanja Modal Jaringan Listrik | 5.852.044.382,00 | 5.110.418.200,00 | 87,33 | 2.588.805.000,00 |

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 337.656.649.839,00 | 336.645.742.957,00 | 99,70 | 228.810.890.667,00 |

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 adalah sebesar Rp337.656.649.839,00 dengan realisasi sebesar Rp336.645.742.957,00 atau 99,70%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 meningkat sebesar Rp107.834.852.290,00 atau 47,13% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp228.810.890.667,00.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Musik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.054.000,00 |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | |
| Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | 159.500.000,00 | 158.766.700,00 | 0,00 | 9.400.000,00 |
| Belanja Modal Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217.500,00 |
| Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan | 142.500.000,00 | 138.028.000,00 | 96,86 | |
| Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi | 8.917.163.200,00 | 8.913.343.200,00 | 99,96 | 2.618.504.756,00 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 395.934.091,00 | 319.495.791,00 | 80,69 | 5.047.616.200,00 |
| Jumlah | 9.635.097.291,00 | 9.549.633.691,00 | 99,11 | 7.798.792.456,00 |

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp9.635.097.291,00 dengan realisasi sebesar Rp9.549.633.691,00 atau 99,11%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 meningkat sebesar Rp1.750.841.235,00 atau 22,45% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp7.798.792.456,00

Dari realisasi belanja modal tersebut, sebesar Rp1.772.960.100,00 merupakan pengeluaran untuk hibah yang seharusnya dianggarkan dalam belanja hibah.

c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp647.143.000,00 atau 21,99% dari anggaran sebesar Rp2.943.355.515,00 yang merupakan pengeluaran karena bencana alam. Adapun realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 adalah sebesar Rp740.224.000,00 berupa pengeluaran untuk bantuan bencana alam.

d. Belanja Transfer

Tidak terdapat belanja transfer pada Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Lubuklinggau menganggarkan Defisit sebesar (Rp133.446.731.405,00). Dengan realisasi defisit sebesar (Rp102.321.446.820,66) dari nilai anggaran. Realisasi defisit tersebut turun sebesar (Rp109.814.609.827,85) atau sebesar 1.465,53% dibandingkan dengan realisasi surplus TA 2021 sebesar Rp7.493.163.007,19

5.1.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan realisasi TA 2021 disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan LRA

| Uraian | Anggaran 2022 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) | % | Realisasi 2021 (Rp) |
|--|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 27.978.178.705,00 | 27.978.178.704,83 | 100,00 | 2.146.265.697,64 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 105.468.552.700,00 | 105.468.552.700,00 | 100,00 | 18.570.000.000,00 |
| Jumlah | 133.446.731.405,00 | 133.446.731.404,83 | 100,00 | 20.716.265.697,64 |

Tabel diatas menyajikan bahwa anggaran untuk Penerimaan Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp133.446.731.406,00 dengan realisasi sebesar Rp133.446.731.404,83 atau 100,00%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp20.716.265.897,64

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2022 sebesar Rp27.978.178.704,83 atau 100% dari anggaran sebesar Rp27.978.178.704,83, mengalami kenaikan sebesar Rp25.831.913.007,19 atau 1.203,% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.146.265.697,64

Realisasi Penerimaan Pinjaman daerah TA 2022 sebesar Rp105.468.552.700,00 dari anggaran sebesar Rp105.468.552.700,00 atau 100,00 % dan TA 2021 sebesar Rp18.570.000.000,00 merupakan pencairan tahap kedua dan ketiga pinjaman daerah. Hal ini berdasarkan akta notaris Liestiani Wang, S.H.,M.kn. nomor 103 Tanggal 30 September 2021 tentang Perjanjian Pinjaman Daerah antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang mana untuk pencairan pinjaman daerah dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan yaitu, tahap pertama setinggi tingginya sebesar 25%, tahap kedua setinggi tingginya sebesar 45 %, tahap ketiga sebesar 30 %.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan realisasi TA 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan 231.250.000,00.

PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama TA 2022. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 sebesar Rp133.446.731.405,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp133.446.731.405,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp112.961.715.707,19 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar 20.485.015.697.64.

5.1.1.5 SiLPA

SiLPA Pemerintah Kota Lubuklinggau TA 2022 adalah sebesar Rp31.125.284.584,17 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.147.105.879,34 atau 11,25% jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2021 sebesar Rp.27.978.178.704,83. Rincian sumber dana/penerimaan SiLPA antara lain:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a. Sisa DAK Non Fisik | Rp5.979.665.587,00 |
| b. Sisa Dana Bantuan Keuangan | Rp15.881.742.300,00 |
| c. DID 2021 | 507.780.600,00 |
| d. Sisa di RKUD Per 31 Desember 2022 | Rp4.974.632.602,10 |
| e. Dana di rek, BLUD | Rp3.653.430.896,07 |
| f. Kas Lainnya | Rp37.587.783,00 |
| g. Kas di bend BOS | Rp90.095.458,00 |
| h. Utang PFK | Rp349.358,00 |
| Jumlah | Rp31.125.284.584,17 |

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 5.26. Mutasi SiLPA 2022

| No | Uraian | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | 27.978.178.704,83 | 2.146.265.697,64 |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 27.978.178.704,83 | 2.146.265.697,64 |
| 3 | Jumlah (1-2) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | 31.125.284.584,17 | 27.978.178.704,83 |
| 5 | Jumlah (3+4) | 31.125.284.584,17 | 27.978.178.704,83 |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih (5+6+7) | | 31.125.284.584,17 | 27.978.178.704,83 |

Tabel di atas menyajikan perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir dengan penjelasan sebagai berikut:

- Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA TA sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan yaitu sebesar Rp27.978.178.704,83
- Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Tahun berjalan sebesar Rp27.978.178.704,83 merupakan SiLPA Tahun 2021 sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2022;
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp31.125.284.584,17 atau naik 11,25% yaitu sebesar Rp3.147.105.879,34 dari SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp27.978.178.704,83; dan
- SAL Akhir Tahun 2022 Rp31.125.284.584,17 atau naik sebesar 11,25% yaitu sebesar Rp3.147.105.879,34 dari SiLPA Awal (Tahun 2021) sebesar Rp27.978.178.704,83.

5.3 NERACA

Penjelasan pos-pos Neraca menguraikan secara jelas mengenai posisi saldo masing-masing rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran. Daftar lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca diuraikan mengenai posisi Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1 ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.399.436.284.028,89 dan Rp3.189.390.752.636,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27. Daftar Nilai Aset per Klasifikasi Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

| Klasifikasi Aset | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aset Lancar | 93.523.870.287,08 | 91.547.166.069,81 |
| Investasi Jangka Panjang | 95.469.113.169,40 | 94.303.403.512,64 |
| Aset Tetap | 3.161.618.859.195,68 | 2.982.024.202.202,10 |
| Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lainnya | 48.824.441.376,73 | 21.515.980.851,62 |
| Jumlah | 3.399.436.284.028,89 | 3.189.390.752.636,17 |

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp93.523.870.287,08 dan Rp91.547.166.069,81 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.28. Daftar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas dan Setara Kas | 31.154.242.966,17 | 29.080.998.810,83 |
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak | 17.577.175.791,00 | 15.686.217.568,00 |
| Piutang Retribusi | 214.000.000,00 | |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 2.632.553.486,88 | 4.165.596.207,00 |
| Piutang transfer antar daerah | 16.732.443.805,00 | 6.291.729.571,00 |
| Piutang Lainnya | 1.170.855.882,00 | 19.612.105.859,00 |
| Penyisihan Piutang | (4.940.045.122,08) | (6.197.910.938,55) |
| Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 28.982.643.478,11 | 22.908.428.992,53 |
| Jumlah | 93.523.870.287,08 | 91.547.166.069,81 |

a. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp31.154.242.966,17 dan Rp29.080.998.810,83 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29. Rincian Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kas di Kas Daerah | 27.373.128.829,10 | 224.311.087,56 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 1.695.027,00 |
| Kas di BLUD | 3.653.430.896,07 | 27.431.323.216,07 |
| Kas Dana BOS | 90.095.458,00 | 296.352.670,00 |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 0,00 | 15.941.945,20 |
| Kas Lainnya | 37.587.783,00 | 1.111.374.865,00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 31.154.242.966,17 | 29.080.998.810,83 |

Penjelasan masing-masing saldo Kas dan Setara Kas di atas sebagai berikut.

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp27.373.128.829,10 dan Rp224.311.087,56 Kas di Kas Daerah menggunakan rekening pada Bank SumselBabel sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Nomor 143.300.0041 a.n. Rekening Giro Kas Umum Daerah Kota Lubuklinggau.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.653.430.896,07, dengan rincian sebagai berikut.

- a) Saldo Kas BLUD RSUD Siti Aisyah sebesar Rp1.026.489.162,07 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau rekening Nomor 143.301.1518 dan sebesar Rp100.478.119,00 pada Bank BNI Cabang Lubuklinggau rekening Nomor 2020444483;

- b) Saldo Kas BLUD Bandiklat Kota Lubuklinggau sebesar Rp2.513.393.287,00 pada Bank SumselBabel Cabang Lubuklinggau rekening Nomor 143.301.1280
- c) Kas di Bendahara Puskesmas per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.070.328,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30. Kas di Bendahara Puskesmas per 31 Desember 2022

| Nama Puskesmas | Saldo di Rekening | | Saldo <i>Cash on Hand</i> (Rp) | Saldo Kas di FKTP (Rp) |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | No. Rekening | Saldo (Rp) | | |
| BLUD Puskesmas Perumnas | 143.30.11308 | 1.566.311,00 | 4.015,00 | 1.570.326,00 |
| BLUD Puskesmas Sidorejo | 143.30.11300 | 1.071.249,10 | 0,00 | 1.071.249,10 |
| BLUD Puskesmas Citra Medika | 143.30.11302 | 2.640.119,15 | 0,00 | 2.640.119,15 |
| BLUD Puskesmas Taba | 143.30.11307 | 699.946,10 | 100.049,00 | 799.995,10 |
| BLUD Puskesmas Swasti Saba | 143.30.11306 | 463.859,75 | 0,00 | 463.859,75 |
| BLUD Puskesmas Petanang | 143.30.11304 | 112.222,75 | 0,00 | 112.222,75 |
| BLUD Puskesmas Megang | 143.30.11305 | 6.044.777,00 | 0,00 | 6.044.777,00 |
| BLUD Puskesmas Sumber Waras | 143.30.11303 | 293.683,15 | 0,00 | 293.683,15 |
| BLUD Puskesmas Simpang Periuk | 143.30.11301 | 27.640,00 | 0,00 | 27.640,00 |
| BLUD Puskesmas Maha Prana | 14.309.003.893 | 41.960,00 | 4.496,00 | 46.456,00 |
| Jumlah | | 12.961.768,00 | 108.560,00 | 13.070.328,00 |

Adapun rincian rekapitulasi dana Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk masing-masing Puskesmas pada *Lampiran 1*.

5) Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.587.783,00 yang merupakan saldo Rekening Bendahara Pengeluaran yang belum disalurkan ke pegawai dan dana Covid-19 yang belum dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut.

- a) Saldo Kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lubuklinggau sebesar Rp28.579.024,00 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau Nomor Rekening 143.301.0445
- b) Saldo Kas Sekretariat Daerah sebesar Rp30.000,00 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau Nomor Rekening 143.301.0424;
- c) Saldo Kas sebesar Rp8.978.759,00 yang merupakan saldo Rekening Bendahara Pengeluaran dana Covid-19 yang belum dibelanjakan.

6) Setara Kas

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

7) Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas sisa kegiatan yang bersumber dari dana BOS APBN yang berada di Bendahara BOS masing-masing sekolah. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.095.458,00 dengan rincian pada *Lampiran 2*.

b. Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

c. Piutang

Piutang Pemerintah Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.31. Rincian Saldo Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Pajak Daerah | 17.577.175.791,00 | 15.686.217.568,00 |
| Piutang Retribusi Daerah | 214.000.000,00 | 0,00 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 2.632.553.486,88 | 4.165.596.207,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 16.732.443.805,00 | 6.291.729.571,00 |
| Piutang Lainnya | 1.170.855.882,00 | 19.612.105.859,00 |
| Jumlah | 38.327.028.964,88 | 45.755.649.205,00 |

a) Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 merupakan Pajak Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian pada sebagai berikut.

Tabel 5.32. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022

| Jenis Pajak | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi | | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | Mutasi tambah (Rp) | Mutasi kurang (Rp) | |
| Pajak Hotel | 358.835.898,00 | 57.212.300,00 | 181.097.364,00 | 234.950.834,00 |
| Pajak Restoran | 628.366.093,00 | 46.292.720,00 | 3.657.852,00 | 671.000.961,00 |
| Pajak Hiburan | 82.151.900,00 | 8.490.250,00 | 0,00 | 90.642.150,00 |
| Pajak Reklame | 1.161.192.587,00 | 662.341.581,00 | 533.176.366,00 | 1.290.357.802,00 |
| Pajak Air Tanah | 80.572.828,00 | 16.407.517,00 | 1.550.651,00 | 95.429.694,00 |

| Jenis Pajak | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi | | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Mutasi tambah (Rp) | Mutasi kurang (Rp) | |
| Pajak Parkir | 61.887.700,00 | 9.305.000,00 | 7.083.000,00 | 64.109.700,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 1.203.427.809,00 | 0,00 | 1.203.427.809,00 | 0,00 |
| Pajak sarang burung walis | 26.624.000,00 | 22.528.000,00 | 0,00 | 49.152.000,00 |
| Pajak Galian C | 75.257.564,00 | 0,00 | 15.855.465,00 | 59.402.099,00 |
| Pajak PBB | 12.007.901.189,00 | 3.310.131.980,00 | 295.902.618,00 | 15.022.130.551,00 |
| Jumlah | 15.686.217.568,00 | 4.132.709.348,00 | 2.241.751.125,00 | 17.577.175.791,00 |

- b) Piutang Retribusi Daerah
Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp214.000.000,00 dan Rp0,00 pada *Lampiran 3*
- c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.632.553.486,88 dan Rp4.165.596.207,00 merupakan Piutang lainnya atas penyaluran DBH Dan/atau DAU secara Non Tunai melalui fasilitas Treasury Deposit facility (TDF) sebesar Rp3.613.635,88 dan piutang BLUD RSUD Siti Aisyah sebesar Rp2.628.939.851,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.33. Rincian Piutang BLUD RSUD Siti Aisyah per 31 Desember 2022

| URAIAN | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi desember 2022 | | Saldo per 31 Desember 2022 | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | Koreksi | Jumlah |
| Lonsum | 5.580.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580.810,00 |
| BPJS/JKN | 1.112.934.800,00 | 17.432.416.294,00 | 16.593.154.094,00 | 31.783.600,00 | 1.920.413.400,00 |
| Ambulance BPJS | 0,00 | 58.153.500,00 | 58.133.200,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| Obat BPJS Kronis | 17.270.742,00 | 217.560.516,00 | 197.494.314,00 | 32.886,00 | 37.304.058,00 |
| Alat Bantu Dengar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Covid-19 | 0,00 | 847.312.000,00 | 847.312.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PeralihanLubuklinggau | 598.984.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.984.600,00 |
| Jamsoskes Musi Rawas | 2.123.567.000,00 | 0,00 | 2.123.567.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jamsoskes Muratara | 194.949.700,00 | | 194.949.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Piutang Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613.635,88 | 3.613.635,88 |
| BPJS Ketenagakerjaan | 0,00 | 23.966.948,00 | 1.448.675,00 | 0,00 | 22.518.273,00 |
| TB.MDR | 39.890.055,00 | 95.198.238,00 | 109.857.083,00 | 150.000,00 | 25.081.210,00 |
| PT.Tropik | 72.418.500,00 | 212.443.500,00 | 270.886.500,00 | (5.082.000,00) | 19.057.500,00 |
| | 4.165.596.207,00 | 18.887.050.996,00 | 20.396.802.566,00 | 30.518.421,88 | 2.632.553.486,88 |

d) Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp16.732.443.805,00 dan Rp6.291.729.571,00 yang merupakan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian pada *Lampiran 4*.

1) **Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya merupakan Piutang atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Piutang Dana Bergulir. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.170.855.882,00 dan Rp19.612.105.859,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34. Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 135.766.579,00 | 151.233.651,00 |
| Piutang Dana Bergulir | 1.035.089.303,00 | 1.035.089.303,00 |
| Uang Muka | 0,00 | 18.425.782.905,00 |
| Jumlah | 1.170.855.882,00 | 19.612.105.859,00 |

a) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Mutasi saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.35. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi 2022 | | Reklas Internal (Rp) | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | tambah (Rp) | kurang (Rp) | | |
| TGR - PNS | | | | | |
| TGR Sebelum Th. 2015 | 28.480.620,00 | 0,00 | 7.224.620,00 | 0,00 | 21.256.000,00 |
| TGR Th. 2015 | 19.900.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 17.900.000,00 |
| TGR Th. 2016 | 11.425.000,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 0,00 | 9.785.000,00 |
| TGR Th. 2017 | 64.223.031,00 | 0,00 | 6.097.452,00 | 0,00 | 58.125.579,00 |
| TGR Th. 2018 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TGR Th. 2019 | 7.705.000,00 | 0,00 | 7.705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TGR Th. 2020 | 17.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| TGR Th. 2022 | 0,00 | 60.910.968,00 | 32.710.968,00 | 14.500.000,00 | 13.700.000,00 |
| Jumlah | 151.233.651,00 | 60.910.968,00 | 61.878.040,00 | 14.500.000,00 | 135.766.579,00 |

Adapun rincian Piutang Tuntutan Ganti Rugi – PNS pada *Lampiran 5*.

b) Piutang Dana Bergulir

Saldo Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan piutang pinjaman dana bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi dan UKM), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36. Rincian Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021

| Jenis pajak | Saldo 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi 2022 | | Saldo 31 Des 2022 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | Tambah(Rp) | Kurang(Rp) | |
| Piutang Pinjaman Dana Usaha (Disperindag) | 488.333.853,00 | 0,00 | 0,00 | 488.333.853,00 |
| Piutang Pinjaman pada Dinas Koperasi dan UKM | 546.755.450,00 | 0,00 | 0,00 | 546.755.450,00 |
| Jumlah | 1.035.089.303,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.089.303,00 |

Rincian Piutang Dana Bergulir pada *Lampiran 6*.

2) Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan penyisihan piutang pendapatan dan piutang lainnya, dengan rincian pada sebagai berikut.

Tabel 5.37. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Saldo Per 31 Des 2021 (Rp) | Penyisihan Tahun 2022 (Rp) | Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Penyisihan Piutang | | | |
| Penyisihan Piutang Pajak Daerah | (3.932.105.115,96) | 102.750.439,09 | (3.829.354.676,87) |
| Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | (1.230.716.209,59) | 1.155.115.067,38 | (75.601.142,21) |
| Jumlah I | (5.162.821.325,55) | 1.257.865.506,47 | (3.904.955.819,08) |
| Penyisihan Piutang Lainnya | | | |
| Dana Bergulir pada Disperindag | (488.333.853,00) | 0,00 | (488.333.853,00) |
| Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Pasar | (546.755.450,00) | 0,00 | (546.755.450,00) |
| Jumlah II | (1.035.089.303,00) | 0,00 | (1.035.089.303,00) |
| Jumlah Total (I+II) | (6.197.910.628,55) | 1.257.865.506,47 | (4.940.045.122,08) |

Rincian penyisihan piutang pada *Lampiran 7* sampai dengan *Lampiran 10*.

d. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

e. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp28.982.643.478,11 dan Rp22.908.428.992,53. Persediaan terdiri atas tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan pakai habis kantor, persediaan bahan/material,

dan persediaan yang akan diberikan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.38. Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Persediaan Bahan Pakai Habis Kantor | 461.058.544,00 | 449.422.725,00 |
| Persediaan Bahan/Material | 5.099.367.390,11 | 9.987.627.267,53 |
| Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga | 23.422.217.544,00 | 12.277.071.000,00 |
| Persediaan Barang Lainnya | 0,00 | 194.308.000,00 |
| Jumlah | 28.982.643.478,11 | 22.908.428.992,53 |

Rincian saldo Persediaan pada *Lampiran 11*.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp95.469.113.169,40 dan Rp94.303.403.512,64, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investasi Jangka Panjang Permanen | 95.469.113.169,40 | 94.303.403.512,64 |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 95.469.113.169,40 | 94.303.403.512,64 |

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuklinggau berupa penyertaan modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap, PT Linggau Bisa dan Bank Sumsel Babel. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuklinggau pada tiga BUMD tersebut per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp95.469.113.169,40 dan Rp94.303.403.512,64, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40. Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--|--------------------|--------------------|
| Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap | 74.084.101.529,62 | 74.576.152.100,42 |
| Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa | 6.355.011.639,78 | 4.697.251.412,22 |
| Investasi dalam Saham Bank SumselBabel | 15.030.000.000,00 | 15.030.000.000,00 |

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------|--------------------|--------------------|
| Jumlah | 95.469.113.169,40 | 94.303.403.512,64 |

1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap

Mutasi penambahan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada PDAM Tirta Bukit Sulap di Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.41. Mutasi Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2021 (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap | 74.154.539.290,07 | 0,00 | 0,00 | 74.154.539.290,07 |
| Akumulasi Laba (Rugi) | (67.324.547,65) | (3.113.212,80) | 0,00 | (70.437.760,45) |
| Saldo Akhir | 74.087.214.742,42 | (3.113.212,80) | 0,00 | 74.084.101.529,62 |

Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki persentase kepemilikan modal 100% pada PDAM Tirta Bukit Sulap sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas.

2) Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa

Saldo penyertaan modal pada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.355.011.639,78, diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.42. Penyertaan Modal kepada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Pemerintah Daerah (Rp) | Pihak Lain (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Penyertaan Modal uang | 13.450.000.000,00 | 50.000.000,00 | 13.500.000.000,00 |
| Penyertaan Modal Barang (Genset) | 309.100.000,00 | 0,00 | 309.100.000,00 |
| Penyertaan Modal Tanah | 1.685.951.280,00 | 0,00 | 1.685.951.280,00 |
| Jumlah penyertaan modal | 15.445.051.280,00 | 50.000.000,00 | 15.495.051.280,00 |
| Persentase Kepemilikan | 99,68% | 0,32% | |
| Akumulasi kerugian s.d. 2022 | (9.090.039.640,22) | (29.452.698,01) | (9.119.492.338,23) |
| Nilai Penyertaan s.d. 2022 | 6.355.011.639,78 | 20.547.301,99 | 6.375.558.941,77 |

Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki persentase kepemilikan modal lebih dari 50% pada PT Linggau Bisa sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas.

3) Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel

Saldo Investasi dalam saham Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2022 dan 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp15.030.000.000,00.

Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki persentase kepemilikan modal kurang dari 50% dan pada Bank Sumsel Babel sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Harga Perolehan.

5.3.1.3 ASET TETAP

Sado Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.161.618.859.195,68 dan Rp2.982.024.202.202,10. Saldo tersebut merupakan hasil perhitungan dari penjumlahan nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2021 dan dikurangi atau ditambah dengan koreksi mutasi selama Tahun 2022 serta dikurangi dengan penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5.43. Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tanah | 580.311.576.027,60 | 546.595.906.680,60 |
| Peralatan dan Mesin | 541.319.380.626,10 | 501.190.177.339,60 |
| Gedung dan Bangunan | 1.166.741.475.690,82 | 1.092.643.407.580,93 |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.842.779.501.930,16 | 2.519.304.873.328,16 |
| Aset Tetap Lainnya | 57.563.075.981,91 | 52.389.148.965,91 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 2.147.687.490,00 | 20.001.407.681,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (2.029.243.838.550,91) | (1.750.100.719.374,10) |
| Jumlah | 3.161.618.859.195,68 | 2.982.024.202.202,10 |

a. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp580.311.576.027,60 dan Rp546.595.906.680,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022

| Uraian | Saldo per 31 Desember 2021 (Rp) | Mutasi 2022 | | Saldo per 31 Desember 2022 (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | |
| Saldo awal Aset Tetap Tanah | 546.595.906.680,60 | 0,00 | 0,00 | 546.595.906.680,60 |
| Penambahan Belanja Modal | | 8.322.213.959,00 | 0,00 | 8.322.213.959,00 |
| Hutang | | 0,00 | 2.490.771.229,00 | (2.490.771.229,00) |
| Reklas | | 664.823.791,00 | 36.000.000,00 | 628.823.791,00 |
| Penilaian | | 22.757.702.600,00 | 0,00 | 22.757.702.600,00 |
| Tindak lanjut | | 4.497.700.226,00 | 0,00 | 4.497.700.226,00 |
| Jumlah | 546.595.906.680,60 | 36.242.440.576,00 | 2.526.771.229,00 | 580.311.576.027,60 |

Saldo per 31 Desember 2022 atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp580.311.576.027,60 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Penambahan belanja modal atas tanah sebesar sebesar Rp8.322.213.959,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.072.213.959,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp250.000.000,00
- 2) Penambahan Belanja Modal tanah dari Hasil penilaian atas tanah yang belum tercatat pada Sistem (SIMDA) sebesar Rp22.757.702.600,00 terdapat pada beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 48.921.600,00;
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 238.914.000,00;
 - c. Dinas Kesehatan sebesar Rp 660.265.800,00;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp130.166.400,00;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp189.696.000,00;
 - f. Dinas Perikanan sebesar Rp424.988.200,00;
 - g. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp202.675.200,00;
 - h. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.000.403.700,00;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.626.640.200,00;
 - j. Dinas Pariwisata sebesar Rp1.404.000.000,00;
 - k. Kecamatan Lubuklinggau Utara I sebesar Rp35.852.700,00;
 - l. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebesar Rp783.478.800,00;
 - m. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II sebesar Rp11.700.000,00.
- 3) Penambahan Belanja Modal tanah dari hasil tindak lanjut atas aset gedung serta jalan irigasi dan jaringan yang tidak ada kode lokasi sebesar Rp4.497.700.226,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Lubuklinggau Barat I sebesar Rp340.000.001,00;
 - b. Kecamatan Lubuklinggau Barat II sebesar Rp538.272.000,00;
 - c. Kecamatan Lubuklinggau Timur I sebesar Rp432.818.960,00;
 - d. Kecamatan Lubuklinggau Timur II sebesar Rp372.588.678,00
 - e. Kecamatan Lubuklinggau Utara I sebesar Rp765.799.953,00
 - f. Kecamatan Lubuklinggau Utara II sebesar Rp1.489.125.884,00;
 - g. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II sebesar Rp559.094.758,00
- 4) Pengurangan atas Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya atas tanah yang telah dihibahkan kepada BPOM RI sesuai BAST Nomor 030/02/BPKAD.V/2022 sebesar Rp36.000.000,00 pada Dinas Pertanian.
- 5) Penambahan atas Reklasifikasi Aset Tetap KDP ke Aset Tetap Tanah atas kompensasi tanam tumbuh tanah pada Kantor DPRD sebesar Rp664.823.791,00

Adapun rincian Aset Tetap Tanah untuk masing-masing SKPD, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.45. Rincian Aset Tetap Tanah untuk Masing-masing OPD per 31 Desember 2022

| OPD | Tanah |
|---|--------------------|
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 15.771.432.791,00 |
| Sekretariat Daerah | 22.687.050.111,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 319.868.327.675,60 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.250.976.763,00 |
| Dinas Perhubungan | 2.125.724.000,00 |
| Dinas Kesehatan | 8.208.125.432,00 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah | 1.274.889.038,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 29.357.944.400,00 |
| Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 16.608.503.601,00 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 60.000.000,00 |
| Dinas Sosial | 151.350.000,00 |
| Dinas Ketenagakerjaan | 0 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | 473.946.000,00 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 69.685.000,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 189.696.000,00 |
| Dinas Pertanian | 2.207.401.700,00 |
| Dinas Perikanan | 1.790.200.258,00 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 629.735.000,00 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 13.468.039.700,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 210.180.000,00 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 96.027.854.212,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 435.000.000,00 |
| Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 0 |
| Inspektorat | 118.800.000,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 0 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | 262.796.000,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 9.361.353.200,00 |
| Dinas Pariwisata | 24.032.951.000,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 205.796.000,00 |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | 123.000.000,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 398.579.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat I | 690.557.001,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat II | 1.047.255.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur I | 1.061.385.960,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur II | 715.138.670,00 |

| OPD | Tanah |
|------------------------------------|---------------------------|
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara I | 2.682.985.653,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara II | 2.661.956.804,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I | 2.076.138.800,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II | 2.006.821.258,00 |
| Jumlah | 580.311.576.027,60 |

Selain permasalahan di atas, terdapat aset tetap tanah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berpotensi sengketa dengan PT KAI berupa tanah Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B dengan nilai sebesar Rp9.500.650.000,00. Tanah Pasar Terminal Atas seluas 10.950 m² dinilai dengan menggunakan NJOP atas tanah yang berada di wilayah sekitarnya yaitu sebesar Rp802.000,00/m² atau sebesar Rp8.781.900.000,00. Pasar Inpres Blok A dan Blok B seluas 3.056,70 m² dengan nilai tanah yang telah tercantum di Neraca masing-masing yaitu tanah Blok A sebesar Rp342.250.000,00 dan tanah Blok B sebesar Rp376.500.000,00.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp541.319.380.626,10 dan Rp501.190.177.339,60. Nilai Aset tetap peralatan dan mesin ekstrakomptabel Tahun 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp1.164.271.690,00 dan Rp13.947.189.281,00. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan mesin sebagai berikut.

Tabel 5.46. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

| Uraian | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi 2022 | | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | |
| Saldo Awal/Aset Tetap Peralatan dan Mesin | 501.190.177.339,60 | 0,00 | 0,00 | 501.190.177.339,60 |
| Belanja Modal | | 25.905.888.028,00 | 0,00 | 25.905.888.028,00 |
| Belanja barang dan jasa yang memenuhi kapitalisasi | | 47.920.000,00 | 0,00 | 47.920.000,00 |
| Hibah | | 30.491.315.061,00 | 0,00 | 30.491.315.061,00 |
| Antar Rekening | | 1.403.385.728,00 | 0,00 | 1.403.385.728,00 |
| Reklas Belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya | | 0,00 | 942.634.735,00 | (942.634.735,00) |
| Pendapatan hibah kementerian Kesehatan | | 111.535.776,00 | 0,00 | 111.535.776,00 |
| Pendapatan hibah kementerian Pendidikan | | 715.360.000,00 | 0,00 | 715.360.000,00 |
| Reklas Antar Rekening | | 0,00 | 5.324.219.268,00 | (5.324.219.268,00) |
| Hutang | | 0,00 | 7.285.249.239,00 | (7.285.249.239,00) |
| Reklas Belanja dibawah nilai kapitalisasi | | 0,00 | 1.177.921.690,00 | (1.177.921.690,00) |
| Reklas mutasi keluar antar SKPD | | 0,00 | 83.057.519,00 | (83.057.519,00) |

| Uraian | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi 2022 | | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | |
| Penghapusan | | 0,00 | 2.779.210.997,50 | (2.779.210.997,50) |
| Reklas dari ATB | | 0,00 | 308.856.115,00 | (308.856.115,00) |
| Barang yang diserahkan ke Masyarakat | | 0,00 | 476.217.600,00 | (476.217.600,00) |
| Tindak lanjut | | 0,00 | 168.834.143,00 | (168.834.143,00) |
| Jumlah | 501.190.177.339,60 | 58.675.404.593,00 | 18.546.201.306,50 | 541.319.380.626,10 |

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk masing-masing OPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.47. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2022

| OPD | Peralatan Mesin |
|---|--------------------|
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 16.938.375.293,00 |
| Sekretariat Daerah | 77.664.943.890,01 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12.832.111.902,00 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 6.089.840.302,00 |
| Dinas Perhubungan | 8.556.562.690,33 |
| Dinas Kesehatan | 50.113.945.497,00 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah | 117.357.205.196,45 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 102.802.017.042,80 |
| Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 9.750.613.529,00 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6.347.794.565,00 |
| Dinas Sosial | 2.492.986.400,00 |
| Dinas Ketenagakerjaan | 4.823.074.615,00 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | 2.201.112.400,00 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6.737.818.225,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.370.384.575,00 |
| Dinas Pertanian | 5.625.717.865,01 |
| Dinas Perikanan | 4.380.646.625,00 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 1.430.994.460,00 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 9.842.377.117,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 2.367.891.776,00 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 6.816.976.390,50 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.716.279.000,00 |
| Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 4.223.092.856,00 |
| Inspektorat | 1.633.175.450,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 3.444.650.400,00 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | 3.960.983.867,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 17.829.879.875,00 |
| Dinas Pariwisata | 4.244.750.348,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.327.977.529,00 |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | 5.086.972.408,00 |

| OPD | Peralatan Mesin |
|--|---------------------------|
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6.816.275.464,00 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 15.167.918.357,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat I | 2.193.832.166,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat II | 1.770.399.400,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur I | 2.099.464.500,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur II | 2.119.944.500,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara I | 2.415.497.900,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara II | 1.590.382.600,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I | 1.216.969.600,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II | 1.917.544.050,00 |
| Jumlah | 541.319.380.626,10 |

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.166.741.475.690,82 dan Rp1.092.643.407.580,93, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.48. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi 2022 | | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | |
| Aset Gedung dan Bangunan | 1.092.643.407.580,93 | 0,00 | 0,00 | 1.092.643.407.580,93 |
| Belanja Modal | | 47.779.448.452,00 | 0,00 | 47.779.448.452,00 |
| Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi | | 32.377.563.080,00 | 0,00 | 32.377.563.080,00 |
| Antar Rekening | | 855.719.000,00 | 0,00 | 855.719.000,00 |
| Mutasi Masuk Antar SKPD | | 37.761.665.499,00 | 0,00 | 37.761.665.499,00 |
| Barang yang diserahkan ke Masyarakat | | 0,00 | 1.283.942.500,00 | (1.283.942.500,00) |
| Reklas Antar Rekening | | 0,00 | 1.102.646.228,00 | (1.102.646.228,00) |
| Reklas ke Aset lain-lain | | | 13.053.095.182,11 | (13.053.095.182,11) |
| Reklas ke KDP | | | 995.500.000,00 | (995.500.000,00) |
| Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap | | 17.985.296.400,00 | 0,00 | 17.985.296.400,00 |
| Hutang | | 0,00 | 12.610.198.431,00 | (12.610.198.431,00) |
| Mutasi Keluar Antar SKPD | | 0,00 | 36.684.784.780,00 | (36.684.784.780,00) |
| Penghapusan | | 0,00 | 991.200.000,00 | (991.200.000,00) |
| Penilaian | | 4.059.742.800,00 | 0,00 | 4.059.742.800,00 |
| Jumlah | 1.092.643.407.580,93 | 140.819.435.231,00 | 66.721.367.121,11 | 1.166.741.475.690,82 |

Terdapat Aset Tetap sebesar Rp19.303.060.000,00 yang berpotensi hilang karena tanah lokasi tempat bangunan tersebut didirikan berpotensi sengketa dengan PT KAI berupa bangunan Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B. Pasar

Terminal Atas seluas 14.693 m² dinilai dengan NJOP bangunan wilayah sekitar dengan nilai bangunan sebesar Rp595.000,00/m² atau sebesar Rp8.742.335.000,00. Sedangkan nilai Pasar Inpres Blok A dan Blok B terdiri atas Rp1.718.125.000,00 dan Rp8.842.600.000,00. Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk masing-masing OPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.49. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk Masing-masing OPD Per 31 Desember 2022

| OPD | Gedung dan Bangunan |
|---|-----------------------------|
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 41.209.578.643,21 |
| Sekretariat Daerah | 54.935.377.612,73 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 234.795.716.924,42 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 14.733.817.394,00 |
| Dinas Perhubungan | 8.772.800.244,11 |
| Dinas Kesehatan | 66.066.875.709,31 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah | 116.680.579.854,02 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 243.560.981.908,64 |
| Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 134.107.670.648,69 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 15.221.374.578,03 |
| Dinas Sosial | 6.257.066.550,00 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | 1.335.505.908,50 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4.447.168.837,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.472.024.000,00 |
| Dinas Pertanian | 11.013.800.089,95 |
| Dinas Perikanan | 8.794.609.500,00 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 3.849.796.800,25 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 69.912.737.846,75 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 809.335.000,00 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 62.800.319.172,50 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 872.605.800,00 |
| Inspektorat | 1.458.480.000,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 511.437.000,00 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | 800.937.931,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 7.455.576.500,00 |
| Dinas Pariwisata | 4.987.958.405,55 |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | 1.240.470.750,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8.489.520.172,16 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat I | 5.647.651.700,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat II | 4.405.817.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur I | 3.817.868.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur II | 4.946.455.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara I | 4.690.746.350,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara II | 4.863.841.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I | 4.485.801.860,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II | 4.289.171.000,00 |
| Jumlah | 1.166.741.475.690,82 |

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.842.779.501.930,16 dan Rp2.519.304.873.328,16. Rincian mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

Tabel 5.50. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022

| Uraian | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi 2022 | | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|--------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.519.304.873.328,16 | 0,00 | 0,00 | 2.519.304.873.328,16 |
| Belanja Modal | | 336.645.742.957,00 | 0,00 | 336.645.742.957,00 |
| Antar Rekening | | 141.011.067,00 | 0,00 | 141.011.067,00 |
| Belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya | | 0,00 | 109.557.000,00 | (109.557.000,00) |
| Hutang | | 0,00 | 32.124.049.827,00 | (32.124.049.827,00) |
| Reklas Antar Rekening | | 0,00 | 102.869.500,00 | (102.869.500,00) |
| Koreksi Lainnya | | 18.425.782.905,00 | 0,00 | 18.425.782.905,00 |
| Mutasi masuk antar SKPD | | 598.568.000,00 | 0,00 | 598.568.000,00 |
| Jumlah | 2.519.304.873.328,16 | 355.811.104.929,00 | 32.336.476.327,00 | 2.842.779.501.930,16 |

Adapun rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk masing-masing SKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.51. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Masing-Masing OPD per 31 Desember 2022

| OPD | Jalan, Irigasi dan Jaringan |
|---|-----------------------------|
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 686.746.400,00 |
| Sekretariat Daerah | 8.392.119.794,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.571.223.575.355,16 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 207.263.123.676,00 |
| Dinas Perhubungan | 9.452.618.850,00 |
| Dinas Kesehatan | 5.182.952.945,00 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah | 2.326.352.700,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.381.786.400,00 |
| Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 221.800.500,00 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 149.953.000,00 |
| Dinas Sosial | 13.630.200,00 |
| Dinas Ketenagakerjaan | 13.850.000,00 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | 169.345.609,00 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 132.305.000,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 71.810.000,00 |
| Dinas Pertanian | 3.424.388.300,00 |
| Dinas Perikanan | 9.575.523.451,00 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 609.300.000,00 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 45.444.000,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 131.988.100,00 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 666.250.200,00 |
| Inspektorat | 90.401.500,00 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | 105.746.300,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 753.866.500,00 |
| Dinas Pariwisata | 1.756.057.400,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 260.406.462,00 |

| OPD | Jalan, Irigasi dan Jaringan |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.849.200.127,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat I | 796.958.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat II | 2.160.746.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur I | 2.050.916.400,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur II | 2.710.174.650,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara I | 1.913.816.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara II | 2.235.594.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I | 2.203.217.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II | 2.757.537.111,00 |
| Jumlah | 2.842.779.501.930,16 |

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp57.563.075.981,91 dan Rp52.389.148.965,91, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52. Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

| Uraian | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi 2022 | | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | |
| Saldo Awal Aset Tetap Lainnya | 52.389.148.965,91 | 0,00 | 0,00 | 52.389.148.965,91 |
| Belanja Modal | | 9.549.633.691,00 | 0,00 | 9.549.633.691,00 |
| Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi | | 0,00 | 12.800.000,00 | (12.800.000,00) |
| Antar Rekening | | 5.151.328.201,00 | 1.021.709.000,00 | 4.129.619.201,00 |
| Hutang | | 0,00 | 7.999.139.200,00 | (7.999.139.200,00) |
| Reklas Belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya | | 0,00 | 275.883.791,00 | (275.883.791,00) |
| ATB | | 0,00 | 134.816.000,00 | (134.816.000,00) |
| Penghapusan | | 0,00 | 82.686.885,00 | (82.686.885,00) |
| Jumlah | 52.389.148.965,91 | 14.700.961.892,00 | 9.527.034.876,00 | 57.563.075.981,91 |

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya untuk masing-masing SKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.53. Rincian Aset Tetap Lainnya untuk Masing-Masing SKPD per 31 Desember 2022

| OPD | Jumlah |
|--|------------------|
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 37.445.455,00 |
| Sekretariat Daerah | 915.877.324,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.540.711.000,00 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 5.128.050.698,85 |
| Dinas Perhubungan | 6.000.000,00 |

| OPD | Jumlah |
|---|-------------------|
| Dinas Kesehatan | 10.100.000,00 |
| Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah | 1.031.663.900,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 40.294.685.853,06 |
| Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 40.000,00 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1.960.695.200,00 |
| Dinas Sosial | 7.500.000,00 |
| Dinas Ketenagakerjaan | 0,00 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 |
| Dinas Pertanian | 4.146.000,00 |
| Dinas Perikanan | 1.833.138.500,00 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 10.940.000,00 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 103.735.000,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 0,00 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 791.230.000,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.285.000,00 |
| Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 0,00 |
| Inspektorat | 100.000,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 266.074.000,00 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | 1.651.980.000,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 4.990.000,00 |
| Dinas Pariwisata | 1.225.094.301,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 90.000,00 |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | 86.552.000,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 14.283.610,00 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 228.435.700,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat I | 141.317.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Barat II | 79.914.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur I | 3.615.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Timur II | 89.640.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara I | 12.143.500,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Utara II | 12.657.800,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I | 4.865.000,00 |
| Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II | 64.080.140,00 |
| Jumlah | 57.563.075.981,91 |

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.147.687.490,00 dan Rp20.001.407.681,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022

| Uraian | Saldo per 31-Des-2021 (Rp) | Mutasi 2022 | | Saldo per 31-Des-2022 (Rp) |
|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | |
| Saldo Awal | 20.001.407.681,00 | 0,00 | 0,00 | 20.001.407.681,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap | | 0,00 | 17.985.296.400,00 | (17.985.296.400,00) |
| Reklas ke Gedung dan Bangunan | | 995.500.000,00 | 0,00 | 995.500.000,00 |
| Koreksi lebih catat | | 0,00 | 199.100.000,00 | (199.100.000,00) |
| Reklas ke Aset Tetap Tanah | | 0,00 | 664.823.791,00 | (664.823.791,00) |
| Jumlah | 20.001.407.681,00 | 995.500.000,00 | 18.849.220.191,00 | 2.147.687.490,00 |

Tabel 5.55. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk Masing-Masing OPD per 31 Desember 2022

| Nama OPD | Jumlah |
|---|-------------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.098.462.490,00 |
| Dinas Kesehatan | 49.225.000,00 |
| Jumlah | 2.147.687.490,00 |

g. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp2.029.243.838.550,91) dan (Rp1.750.100.719.374,10)

Rincian Akumulasi Penyusutan pada *Lampiran 12*.

5.3.1.4 DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

Sado Aset Lainnya Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp48.824.858.376,73 dan Rp21.515.980.851,62 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56. Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Tagihan Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 19.047.993.625,00 | 18.604.321.510,00 |
| Aset Lain-lain | 46.387.471.590,73 | 18.398.653.690,62 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (14.670.198.181,00) | (13.546.168.691,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (1.940.825.658,00) | (1.940.825.658,00) |
| Jumlah | 48.824.441.376,73 | 21.515.980.851,62 |

a. Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

c. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.047.993.625,00 dan Rp18.604.321.510,00. Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tidak Berwujud berupa aplikasi untuk mendukung kegiatan Pemerintah, berupa *software*. Rincian saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5.57. Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tidak Berwujud | Saldo per 31-Dec-21 | Mutasi 2022 | | Saldo Per 31-Dec-22 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| | | Penambahan | Pengurangan | |
| Software | 14.029.651.510,00 | 336.056.115,00 | 0,00 | 14.365.707.625,00 |
| Kajian Lainnya | 4.515.270.000,00 | 90.576.000,00 | 0,00 | 4.605.846.000,00 |
| Hak Cipta | 59.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400.000,00 |
| Lisensi dan Frenchise | 0,00 | 17.040.000,00 | 0,00 | 17.040.000,00 |
| Jumlah | 18.604.321.510,00 | 443.672.115,00 | 0,00 | 19.047.993.625,00 |

Rincian Aset Tidak Berwujud pada *Lampiran 13*.

d. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp46.387.471.590,73 dan Rp18.398.653.690,62, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022

| Uraian | Saldo per 31 Des 2021 | Mutasi | | Saldo per 31 Des 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| | | Tambah | Kurang | |
| Saldo Awal | 18.398.653.690,62 | 0,00 | 0,00 | 18.398.653.690,62 |
| Reklas dari Aset Tetap Tanah | | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 |
| Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan | | 13.053.095.182,11 | 0,00 | 13.053.095.182,11 |
| Penyaluran Pokok DBH /DAU melalui TDF | | 14.899.722.718,00 | 0,00 | 14.899.722.718,00 |
| Jumlah | 18.398.653.690,62 | 27.988.817.900,11 | 0,00 | 46.387.471.590,73 |

Saldo per 31 Desember 2022 atas Aset Lain-lain sebesar Rp46.387.471.590,73 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Saldo awal sebesar Rp18.398.653.690,62 terdiri dari kekurangan volume dan Aset P3D yang belum diserahkan terimakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Mutasi tambah atas Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penambahan sebesar Rp13.006.997.182,11 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Aset dari PT. Linggau Bisa,

namun per 31 Desember 2022 belum terdapat Penyertaan Modal dari Pemda ke PT. Linggau Bisa.

- b) Penambahan sebesar Rp36.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah yang telah dihibahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sesuai BAST Nomor 030/02/BPKAD.V/2022 tanggal 4 Januari 2022, namun per 31 Desember 2022 belum terdapat SK Penghapusan.
- c) Penambahan sebesar Rp46.515.000,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah dihibahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sesuai BAST Nomor 030/02/BPKAD.V/2022 tanggal 4 Januari 2022, namun per 31 Desember 2022 belum terdapat SK Penghapusan.
- d) Penambahan sebesar Rp14.899.722.718,00 merupakan penyaluran DBH/DAU yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposite Facilities* (TDF) sesuai Pemberitahuan dari Dirjen Perimbangan dan Keuangan Daerah melalui Surat Nomor S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penyampaian Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 dan telah diatur lebih lanjut melalui PMK No.19 Tahun 2023. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral Keuangan Bina Keuangan Daerah Kemendagri kepada Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia Nomor 900.1.14.1/7481/keuda tanggal 15 Maret 2023 perihal pengelolaan DBH/DAU melalui fasilitas TDF, maka kebijakan akuntansi disesuaikan dengan perlakuan sebagai berikut.
 - (a) Dalam hal penyaluran pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO).
 - (b) Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-lain-lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya.

Rincian Aset Lain-lain pada *Lampiran 14*.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp14.670.198.181,00) dan (Rp13.546.168.691,00)

Tabel 5.59. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

| Uraian | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi | | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| | | Penambahan | Pengurangan | |
| Software | (12.752.780.827,00) | (649.844.228,00) | 0,00 | (13.402.625.055,00) |
| Kajian Lainnya | (785.962.864,00) | (467.520.262,00) | 0,00 | (1.253.483.126,00) |
| Hak Cipta | (7.425.000,00) | (5.940.000,00) | 0,00 | (13.365.000,00) |
| Lisensi dan Frenchise | 0,00 | (725.000,00) | 0,00 | (725.000,00) |

| Uraian | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi | | Saldo per 31 Des 2022 (Rp) |
|--------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| | | Penambahan | Pengurangan | |
| Jumlah | (13.546.168.691,00) | (1.124.029.490,00) | 0,00 | (14.670.198.181,00) |

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp1.940.825.658,00) dan (Rp1.940.825.658,00)

5.3.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp139.983.584.823,00 dan Rp141.060.527.012,34, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kewajiban Jangka Pendek | 46.954.665.347,00 | 122.490.527.012,34 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 93.028.919.476,00 | 18.570.000.000,00 |
| Jumlah | 139.983.584.823,00 | 141.060.527.012,34 |

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Sado Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp46.954.665.347,00 dan Rp122.490.527.012,34, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 349.358,00 | 424.000,00 |
| Utang Bunga | 0,00 | 14.598.083,00 |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 31.009.633.224,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 16.934.250,00 | 18.333.333,34 |
| Utang Belanja | 15.753.376.990,00 | 58.746.956.371,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 174.371.525,00 | 63.710.215.225,00 |
| Jumlah | 46.954.665.347,00 | 122.490.527.012,34 |

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Sado Utang PFK Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp349.358,00 dan Rp424.000,00. Atas utang PFK sebesar Rp349.358,00 terdapat pada 3 (tiga) OPD dengan rincian sebagai berikut.

1. Dinas Ketahanan Pangan terdapat PFK PPh Ps 21 yang sudah dibayarkan pada SP2D Non Anggaran tapi belum dipungut sebesar Rp122.500 dan sudah terlanjur disetor ke kas Negara, sehingga saldo PFK (Rp122.500);
2. Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana telah dipungut PFK PPh Ps 21, namun belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp15.392,00;

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat telah dipungut PFK PPh Ps 21 namun belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp32.516,00; dan

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas utang PFK Taperum tahun 2020 yang telah di pungut, namun belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp424.000,00.

b. Utang Bunga

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.598.083,00.

c. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Saldo Utang Pinjaman Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp31.009.633.224,00 dan Rp0,00.

e. Pendapatan Diterima Di Muka

Sado Pendapatan Diterima Di Muka Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.934.250,00 dan Rp18.333.333,34.

f. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.753.376.990,00 dan Rp58.746.956.371,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62. Utang Belanja per 31 Desember 2022

| Jenis Utang Beban | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) | Mutasi | | Saldo per 31 Des 2021 (Rp) |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | |
| Utang BLUD RSUD Siti Aisyah | 22.971.232.036,00 | 3.605.579.110,00 | 22.605.414.756,00 | 3.971.396.390,00 |
| Utang Pelayanan Jamsoskes | 2.243.303.000,00 | 0,00 | 2.243.303.000,00 | 0,00 |
| Utang Belanja TA 2021 | 33.532.421.335,00 | 0,00 | 21.750.440.735,00 | 11.781.980.600,00 |
| Jumlah | 58.746.956.371,00 | 3.605.579.110,00 | 46.599.158.491,00 | 15.753.376.990,00 |

Rincian Utang BLUD RSUD Siti Aisyah, Utang Pelayanan Jamsoskes, Utang Belanja TA 2022 dan Utang Belanja TA 2021 pada *Lampiran 15*, *Lampiran 16* dan *Lampiran 17*.

g. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp174.371.525,00 dan Rp63.710.215.225,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022

| Jenis Utang Jangka pendek lainnya | Saldo per 31 Desember 2021 (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo per 31 Desember 2022 (Rp) |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| Utang TA 2015 | 8.120.490,00 | 0,00 | 8.120.490,00 | 0,00 |
| Utang Dinas PU TA 2014 | 265.863.359,00 | 0,00 | 265.863.359,00 | 0,00 |
| Sisa Retensi TA 2014 | 174.371.525,00 | 0,00 | 0,00 | 174.371.525,00 |
| Utang TA 2021 | 63.261.859.851,00 | 0,00 | 63.261.859.851,00 | 0,00 |
| Jumlah | 63.710.215.225,00 | 0,00 | 63.535.843.700,00 | 174.371.525,00 |

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada *Lampiran 18*.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah Rp93.028.919.476,00 dan 2021 sebesar Rp18.570.000.000,00.

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrasktruktur (Persero) dalam bentuk pinjaman dalam negeri yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Saldo per 31 Desember 2022 adalah realisasi pencairan tahap pertama, kedua dan ketiga.

5.3.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.259.452.699.205,89 dan Rp3.048.330.225.623,83. Saldo tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban. Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan yang umumnya mencakup pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Pendapatan – LO Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.110.139.199.266,76 dan Rp978.712.233.114,03, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64. Pendapatan – LO

| Uraian | Jumlah 2022 (Rp) | Jumlah 2021 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO | 104.957.812.703,55 | 114.794.573.199,15 | (9.836.760.495,60) |
| Pendapatan Transfer – LO | 981.439.874.390,21 | 800.146.785.342,30 | 181.293.089.047,91 |

| Uraian | Jumlah 2022 (Rp) | Jumlah 2021 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO | 23.741.512.173,00 | 63.770.874.572,58 | (40.029.362.399,58) |
| Jumlah | 1.110.139.199.266,76 | 978.712.233.114,03 | 131.426.966.152,73 |

Tabel di atas menyajikan terdapat kenaikan Pendapatan – LO sebesar Rp131.426.966.152,73 pada Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Pendapatan – LO Tahun 2021. Adapun rincian Pendapatan – LO sebagai berikut:

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.65. Pendapatan Asli Daerah – LO

| Uraian | Jumlah 2022 (Rp) | Jumlah 2021 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pajak Daerah-LO | 52.278.223.639,00 | 42.514.967.846,00 | 9.763.255.793,00 |
| Retribusi Daerah-LO | 5.972.970.894,00 | 5.207.620.310,00 | 765.350.584,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 2.437.443.567,98 | 2.230.523.344,23 | 206.920.223,75 |
| Lain-lain PAD yang Sah-LO | 44.269.174.602,57 | 64.841.461.698,92 | (20.572.287.096,35) |
| Jumlah | 104.957.812.703,55 | 114.794.573.199,15 | (9.836.760.495,60) |

Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.66. Pendapatan Pajak Daerah – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Pajak Hotel – LO | 2.939.502.876,00 | 2.292.400.299,00 | 647.102.577,00 |
| Pajak Restoran – LO | 7.948.762.423,00 | 6.521.429.507,00 | 1.427.332.916,00 |
| Pajak Hiburan – LO | 2.185.315.590,00 | 1.155.003.605,00 | 1.030.311.985,00 |
| Pajak Reklame – LO | 4.389.321.479,00 | 4.185.428.560,00 | 203.892.919,00 |
| Pajak Penerangan Jalan - LO | 13.847.282.353,00 | 13.921.962.850,00 | (74.680.497,00) |
| Pajak Parkir – LO | 1.078.412.661,00 | 747.031.293,00 | 331.381.368,00 |
| Pajak Air Tanah – LO | 272.170.215,00 | 249.898.781,00 | 22.271.434,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet - LO | 249.216.000,00 | 235.392.000,00 | 13.824.000,00 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO | 3.422.708.768,00 | 1.894.165.921,00 | 1.528.542.847,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO | 6.800.232.794,00 | 6.343.124.825,00 | 457.107.969,00 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah | 9.145.298.480,00 | 4.969.130.205,00 | 4.176.168.275,00 |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| dan Bangunan (BPHTB) - LO | | | |
| Jumlah | 52.278.223.639,00 | 42.514.967.846,00 | 9.763.255.793,00 |

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.67. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO | 404.960.461,00 | 112.818.100,00 | 292.142.361,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO | 581.580.000,00 | 604.403.500,00 | (22.823.500,00) |
| Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO | 1.350.000,00 | 4.200.000,00 | (2.850.000,00) |
| Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO | 700.587.000,00 | 667.269.000,00 | 33.318.000,00 |
| Retribusi Pelataran-LO | 477.349.000,00 | 602.111.000,00 | (124.762.000,00) |
| Retribusi Los-LO | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| Retribusi Kios-LO | 222.823.350,00 | 0,00 | 222.823.350,00 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO | 853.850.000,00 | 901.525.000,00 | (47.675.000,00) |
| Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO | 106.328.250,00 | 106.727.850,00 | (399.600,00) |
| Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO | 13.500.000,00 | 13.750.000,00 | (250.000,00) |
| Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO | 507.266.000,00 | 315.792.000,00 | 191.474.000,00 |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO | 272.553.440,00 | 312.295.860,00 | (39.742.420,00) |
| Retribusi Pemakaian Ruang-LO | 15.000.000,00 | 21.000.000,00 | (6.000.000,00) |
| Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO | 826.800.000,00 | 960.968.000,00 | (134.168.000,00) |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO | 0,00 | 276.851.000,00 | (276.851.000,00) |
| Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO | 259.671.000,00 | 213.372.000,00 | 46.299.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO | 77.000.000,00 | 19.417.000,00 | 57.583.000,00 |
| Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO | 9.414.000,00 | 0,00 | 9.414.000,00 |
| Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO | 641.498.393,00 | 75.120.000,00 | 566.378.393,00 |

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO | 404.960.461,00 | 112.818.100,00 | 292.142.361,00 |
| Jumlah | 5.972.970.894,00 | 5.207.620.310,00 | 765.350.584,00 |

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO sebesar Rp2.437.443.567,98 dan 2.230.523.344,23.

d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Nilai Lain-lain PAD Yang Sah – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.68. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|------------------|-----------------|-----------------------------|
| Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO | 273.272.649,00 | 0,00 | 273.272.649,00 |
| Hasil Sewa BMD-LO | 325.540.000,00 | 248.275.600,00 | 77.264.400,00 |
| Jasa Giro pada Kas Daerah-LO | 587.610.837,00 | 331.396.811,00 | 256.214.026,00 |
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO | 89.883.068,00 | 0,00 | 89.883.068,00 |
| Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO | 616.625.668,00 | 52.534.247,00 | 564.091.421,00 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO | 46.410.968,00 | 32.161.334,00 | 14.249.634,00 |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk | 1.676.495.742,07 | 23.982.197,00 | 1.652.513.545,07 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 516.777.894,16 | 353.147.783,09 | 163.630.111,07 |
| Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO | 8.798.448,00 | 33.219.167,00 | (24.420.719,00) |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO | 13.868.522,00 | 50.800.296,00 | (36.931.774,00) |
| Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO | 1.752.532,00 | 4.273.631,00 | (2.521.099,00) |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO | 90.032.759,00 | 58.618.233,00 | 31.414.526,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO | 1.901.448,00 | 3.474.256,00 | (1.572.808,00) |
| Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO | 1.012.182,00 | 2.814.682,00 | (1.802.500,00) |
| Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO | 967.680,00 | 3.689.600,00 | (2.721.920,00) |
| Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO | 459.340,00 | 449.457,00 | 9.883,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO | 103.194.408,00 | 87.660.108,00 | 15.534.300,00 |

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO | 36.139.204,00 | 442.111.171,00 | (405.971.967,00) |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO | 585.154,00 | 226.218.400,00 | (225.633.246,00) |
| Pendapatan dari BLUD-LO | 31.259.162.610,34 | 53.459.583.475,83 | (22.200.420.865,49) |
| Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO | 8.627.623.035,00 | 9.427.051.250,00 | (799.428.215,00) |
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO | 6.350.000,00 | 0,00 | 6.350.000,00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO | (15.289.546,00) | 0,00 | (15.289.546,00) |
| Jumlah | 44.269.174.602,57 | 64.841.461.698,92 | -20.572.287.096,35 |

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Nilai Pendapatan Transfer – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.69. Pendapatan Transfer – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO | 821.753.977.461,00 | 689.461.712.478,00 | 117.392.542.265,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO | 159.685.896.929,21 | 110.685.072.864,30 | 49.000.824.064,91 |
| Jumlah | 981.439.874.390,21 | 800.146.785.342,30 | 166.393.366.329,91 |

Rincian Pendapatan Transfer – LO disajikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.70. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO | 214.461.763.269,00 | 107.023.311.835,00 | 107.438.451.434,00 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO | 454.839.287.302,00 | 441.802.413.000,00 | 13.036.874.302,00 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO | 40.545.121.203,00 | 57.058.049.834,00 | (16.512.928.631,00) |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO | 84.166.839.687,00 | 59.142.962.809,00 | 25.023.876.878,00 |
| DID-LO | 27.740.966.000,00 | 24.434.975.000,00 | 3.305.991.000,00 |
| Jumlah | 821.753.977.461,00 | 689.461.712.478,00 | 132.292.264.983,00 |

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.71. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO | 15.084.787.006,00 | 10.251.459.563,00 | 4.833.327.443,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air – LO | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO | 12.739.196.954,00 | 12.406.201.863,00 | 332.995.091,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LO | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO | 37.477.445.148,51 | 30.277.821.172,00 | 7.199.623.976,51 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO | 162.164.543,00 | 169.788.342,00 | (7.623.799,00) |
| Kendaraan Bermotor Alat Berat - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat – LO | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Atas Air-LO | 5.141,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO | 16.786.771.336,70 | 16.149.404.199,30 | 637.367.137,40 |
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 77.435.526.800,00 | 41.430.397.725,00 | 36.005.129.075,00 |
| Jumlah | 159.685.896.929,21 | 110.685.072.864,30 | 49.000.818.923,91 |

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.72. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan Hibah-LO | 23.741.512.173,00 | 34.377.374.572,58 | (10.635.862.399,58) |
| Dana Darurat-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 0,00 | 29.393.500.000,00 | (29.393.500.000,00) |
| Jumlah | 23.741.512.173,00 | 63.770.874.572,58 | (40.029.362.399,58) |

Rincian Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO disajikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah – LO

Nilai Pendapatan Hibah – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp23.741.512.173,00 dan Rp34.377.374.572,58. Pendapatan Hibah – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari:

Tabel 5.73. Pendapatan Hibah-LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO | 22.956.921.141,00 | 6.434.208.895,00 | 16.522.712.246,00 |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO | 529.591.032,00 | 27.943.165.677,58 | (27.413.574.645,58) |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO | 255.000.000,00 | 0,00 | 255.000.000,00 |
| Jumlah | 23.741.512.173,00 | 34.377.374.572,58 | (10.635.862.399,58) |

- 1) Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI atas Alkes dengan SP2B No.KN.02.07/I.3/15728/2021 tanggal.07 Desember 2021 sebesar Rp5.589.432.000,00,
- 2) Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI atas Alkes dengan SP2B No.KN.02.07/I.3/15629/2021 tanggal.17 Nopember 2021 sebesar Rp9.292.896.800,00;
- 3) Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa Alkes dengan SP2B No.KN.02.07/I.3/15728/2021 tanggal.07 Desember 2021 sebesar Rp7.246.336.365,00
- 4) Pendapatan Hibah dari Barang Persediaan alat/obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp529.591.032,00
- 5) Pendapatan Hibah Bantuan Bina Lingkungan di Bidang Kesehatan Tahun 2022, berupa mobil ambulance oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 28 Juni 2022 pada RSUD Siti Aisyah sebesar Rp255.000.000,00;.
- 6) Pendapatan Hibah Bantuan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, berupa oksigen Concentrator sesuai Berita Acara Nomor .KN.02.02/1/3384/2022 tanggal 2 November tahun 2022 sebesar Rp111.535.776,00;
- 7) Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, berupa peralatan TIK SD 2022 (BA-BUN) pada SDN 18 Kota Lubuklinggau sesuai Berita Acara Nomor. 33/Prov.Sumatera Selatan-5601/BAST/SMF/2022 tanggal 25 November 2022 sebesar Rp89.590.000,00;
- 8) Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, berupa peralatan TIK SD 2022 (BA-BUN) pada SDN 11 Kota Lubuklinggau sesuai Berita Acara Nomor. 33/Prov.Sumatera Selatan-5602/BAST/SMF/2022 tanggal 25 November 2022 sebesar Rp89.590.000,00
- 9) Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, berupa peralatan TIK SD 2022 (BA-BUN) pada SDN 20 Kota Lubuklinggau sesuai Berita Acara Nomor. 33/Prov.Sumatera Selatan-5603/BAST/SMF/2022 tanggal 25 November 2022 sebesar Rp89.590.000,00;
- 10) Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, berupa peralatan TIK SD 2022 (BA-BUN) pada SDN 34 Kota Lubuklinggau sesuai Berita Acara Nomor. 33/Prov.Sumatera Selatan-5604/BAST/SMF/2022 tanggal 25 November 2022 sebesar Rp89.590.000,00;

- 11) Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, berupa peralatan TIK SD 2022 (BA-BUN) pada SDN 31 Kota Lubuklinggau sesuai Berita Acara Nomor. 33/Prov.Sumatera Selatan-5605/BAST/SMF/2022 tanggal 25 November 2022 sebesar Rp89.590.000,00;
- 12) Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, berupa peralatan TIK SD 2022 (BA-BUN) pada SDN 36 Kota Lubuklinggau sesuai Berita Acara Nomor. 33/Prov.Sumatera Selatan-5606/BAST/SMF/2022 tanggal 25 November 2022 sebesar Rp89.590.000,00;
- 13) Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, berupa peralatan TIK SD 2022 (BA-BUN) pada SDN 24 Kota Lubuklinggau sesuai Berita Acara Nomor. 3/Prov.Sumatera Selatan-5607/BAST/SMF/2022 tanggal 24 November 2022 sebesar Rp89.590.000,00;
- 14) Pendapatan Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, berupa peralatan TIK SD 2022 (BA-BUN) pada SDN 54 Kota Lubuklinggau sesuai Berita Acara Nomor. 33/Prov.Sumatera Selatan-5609/BAST/SMF/2022 tanggal 24 November 2022 sebesar Rp89.590.000,00;

b. Dana Darurat – LO

Nilai Pendapatan Dana Darurat – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

c. Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan -LO

Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan -LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp29.393.500.000,00

5.4.2 BEBAN – LO

Nilai Beban – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.74. Beban – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Beban Operasi | 660.261.277.961,67 | 668.724.323.910,15 | (8.463.045.948,48) |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 285.855.916.593,21 | 230.332.421.877,01 | 55.523.494.716,20 |
| Jumlah | 946.117.194.554,88 | 899.056.745.787,16 | 47.060.448.767,72 |

Rincian Beban– LO disajikan sebagai berikut ini.

5.4.2.1 BEBAN OPERASI – LO

Nilai Beban Operasi – LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp946.117.194.554,88 dan Rp899.056.745.787,16. Tabel di atas menyajikan bahwa terdapat penurunan Beban Operasi – LO untuk Tahun 2022 sebesar (Rp47.060.448.767,72) jika dibandingkan dengan Beban Operasi – LO Tahun 2021. Adapun rincian Beban Operasi – LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.75. Beban Operasi – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Beban Pegawai | 359.220.909.073,00 | 346.392.440.564,00 | 12.828.468.509,00 |
| Beban Barang dan Jasa | 256.870.638.650,62 | 306.624.498.588,56 | (49.753.859.937,94) |
| Beban Bunga | 7.315.243.513,00 | 245.848.083,00 | 7.069.395.430,00 |
| Beban Hibah | 32.193.066.978,00 | 13.302.981.362,00 | 18.890.085.616,00 |
| Beban Bantuan Sosial | 3.475.500.000,00 | 65.000.000,00 | 3.410.500.000,00 |
| Beban Penyisihan Piutang | 1.185.919.747,05 | 1.504.634.481,97 | (318.714.734,92) |
| Beban Lain-lain | 0,00 | 588.920.830,62 | (588.920.830,62) |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 285.855.916.593,21 | 230.332.421.877,01 | 55.523.495.016,20 |
| Jumlah | 946.117.194.554,88 | 899.056.745.787,16 | 47.060.449.067,72 |

Rincian Beban Operasi – LO sebagai berikut ini:

a. Beban Pegawai

Nilai Beban Pegawai – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp359.220.909.073,00 dan Rp346.392.440.564,00, dengan sebagai berikut:

Tabel 5.76. Beban Pegawai – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Beban Gaji dan Tunjangan – LO | 261.777.670.729,00 | 250.621.576.361,00 | 11.156.094.368,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO | 12.561.164.308,00 | 5.573.282.180,00 | 6.987.882.128,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 45.999.735.303,00 | 49.516.432.231,00 | (3.516.696.928,00) |
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO | 357.850.000,00 | 373.103.350,00 | (15.253.350,00) |
| Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 453.954.149,00 | 366.000.000,00 | 87.954.149,00 |
| Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 16.561.683.707,00 | 19.882.481.192,00 | (3.320.797.485,00) |
| Beban Pegawai BOS | 8.125.524.696,00 | 0,00 | 8.125.524.696,00 |
| Beban Honorarium Pengelola Dana BOS | 0,00 | 6.121.303.000,00 | (6.121.303.000,00) |
| Beban Pegawai - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | 13.383.326.181,00 | 13.938.262.250,00 | (554.936.069,00) |
| Jumlah | 359.220.909.073,00 | 346.392.440.564,00 | 12.828.468.509,00 |

b. Beban Barang dan Jasa

Nilai Beban Barang dan Jasa – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp256.870.638.650,62 dan Rp306.624.498.588,56, dengan sebagai berikut:

Tabel 5.77. Beban Barang dan Jasa

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Beban Persediaan | 42.503.058.968,03 | 60.663.606.702,18 | (18.160.547.734,15) |
| Beban Barang | 13.295.820.996,00 | 12.222.244.193,00 | 1.073.576.803,00 |
| Beban Jasa | 71.126.243.839,00 | 72.794.333.252,00 | (2.332.159.413,00) |
| Beban Uang/Barang Diserahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat | 559.144.775,00 | 17.310.651.901,88 | (16.751.507.126,88) |
| Beban Jasa yang Diberikan ke Pihak Ketiga/Masyarakat | 826.968.000,00 | 1.267.837.500,00 | (440.869.500,00) |
| Beban Asuransi | 0,00 | 30.008.769.254,00 | (30.008.769.254,00) |
| Beban Sewa | 3.817.014.720,00 | 3.414.335.619,00 | 402.679.101,00 |
| Beban Pemeliharaan | 20.623.142.088,00 | 9.112.311.749,00 | 11.510.830.339,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 60.223.134.915,00 | 44.348.770.547,00 | 15.874.364.368,00 |
| Beban Barang dan Jasa BOS | 11.150.010.660,00 | 15.916.079.295,00 | (4.766.068.635,00) |
| Beban Barang dan Jasa BLUD | 32.746.099.689,59 | 39.565.558.575,50 | (6.819.458.885,91) |
| Jumlah | 256.870.638.650,62 | 306.624.498.588,56 | (50.417.929.937,94) |

c. Beban Bunga

Nilai Beban Bunga – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 7.315.243.513,00 dan Rp245.848.083,00.

d. Beban Subsidi

Nilai Beban Subsidi – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

e. Beban Hibah

Nilai Beban Hibah – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp32.193.066.978,00 dan Rp13.302.981.362,00 dengan sebagai berikut:

Tabel 5.78. Beban Hibah – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--|------------------|-----------------|-----------------------------|
| Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 4.600.000.000,00 | 0,00 | 4.600.000.000,00 |
| Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 6.322.459.550,00 | 0,00 | 6.322.459.550,00 |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan | 9.267.992.150,00 | 0,00 | 9.267.992.150,00 |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 7.496.202.287,00 | 0,00 | 7.496.202.287,00 |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 4.008.821.391,00 | 0,00 | 4.008.821.391,00 |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 497.591.600,00 | 0,00 | 497.591.600,00 |

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 138.147.610,00 | (138.147.610,00) |
| Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 0,00 | 12.667.242.152,00 | (12.667.242.152,00) |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 0,00 | 497.591.600,00 | (497.591.600,00) |
| Jumlah | 32.193.066.978,00 | 13.302.981.362,00 | 18.890.085.616,00 |

f. Beban Bantuan Sosial

Nilai Beban Bantuan Sosial – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp3.475.500.000,00 dan Rp65.000.000,00, dengan sebagai berikut:

Tabel 5.79. Beban Bantuan Sosial – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 175.000.000,00 | 0,00 | 175.000.000,00 |
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 100.500.000,00 | 0,00 | 100.500.000,00 |
| Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 3.200.000.000,00 | 0,00 | 3.200.000.000,00 |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga | 0,00 | 65.000.000,00 | (65.000.000,00) |
| Jumlah | 3.475.500.000,00 | 65.000.000,00 | 3.410.500.000,00 |

g. Beban Penyisihan Piutang

Nilai Beban Penyisihan Piutang – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.185.919.747,05 dan Rp1.504.634.481,97, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80. Beban Penyisihan Piutang – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan(Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Beban Penyisihan Piutang Pajak | 30.804.679,68 | 1.497.148.922,98 | (1.430.371.208,59) |
| Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 1.155.115.067,37 | 7.485.558,99 | 1.147.629.508,38 |
| Jumlah | 1.185.919.747,05 | 1.504.634.481,97 | (282.741.700,21) |

h. Beban Lain-lain

Nilai Beban Lain-Lain – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, merupakan beban penurunan investasi atas PDAM Tirta Bukit Sulap dan PT Linggau Bisa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp588.920.830,62

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp285.855.916.593,21 dan Rp230.332.421.877,01, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 60.396.833.338,11 | 36.793.529.338,01 | 23.603.304.000,10 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 23.736.262.313,00 | 21.701.793.952,00 | 2.034.468.361,00 |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 200.401.561.849,10 | 169.928.628.893,00 | 30.472.932.956,10 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 197.229.603,00 | 188.249.591,00 | 8.980.012,00 |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | 0,00 | 239.098.959,00 | (239.098.959,00) |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 1.124.029.490,00 | 1.481.121.144,00 | (357.091.654,00) |
| Jumlah | 285.855.916.593,21 | 230.332.421.877,01 | 55.523.494.716,20 |

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI – LO

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi – LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO setelah dikurangi dengan Beban – LO. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp164.022.004.711,88. (surplus) dan Rp79.655.487.326,87 (surplus) atau terdapat penurunan sebesar (Rp84.366.517.385,01).

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO merupakan selisih antara Surplus Non Operasional setelah dikurangi dengan Defisit Non Operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp1.494.774.518,24) dan defisit Rp5.819.329.020,37.

5.4.4.1. SURPLUS NON OPERASIONAL – LO

Nilai Surplus Non Operasional – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp27.650.239.492,14.

5.4.4.2. DEFISIT NON OPERASIONAL – LO

Nilai Defisit Non Operasional – LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp1.494.774.518,24) dan (Rp21.830.910.471,77). Defisit di Tahun 2022, terdiri dari penurunan investasi permanen sebesar (Rp829.341.623,24) dan penghapusan aset tetap yang telah rusak berat sebesar (Rp665.432.895,00).

Tabel 5.82. Rekapitulasi Penghapusan Aset Tetap

| Kode | OPD | KIB | NILAI | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|------|---|-----|----------------|----------------------|---------------|
| 4.8 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | B | 200.370.000,00 | 200.370.000,00 | 0,00 |
| 4.1 | Sekretariat Daerah | B | 70.565.100,00 | 26.315.400,00 | 44.249.700,00 |
| 1.3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | B | 1.100.000,00 | 513.334,00 | 586.666,00 |
| 1.4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | B | 2.211.880,00 | 2.138.152,00 | 73.728,00 |

| Kode | OPD | KIB | NILAI | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|---------------|--|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.2 | Dinas Kesehatan | B | 25.907.200,00 | 25.255.656,00 | 651.544,00 |
| 1.2 | Dinas Kesehatan | C | 238.150.000,00 | 120.761.094,00 | 117.388.906,00 |
| 1.1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | B | 672.062.750,50 | 666.469.532,50 | 5.593.218,00 |
| 1.1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | C | 753.050.000,00 | 258.035.867,00 | 495.014.133,00 |
| 1.6 | Dinas Sosial | B | 37.458.000,00 | 37.458.000,00 | 0,00 |
| 2.1 | Dinas Ketenagakerjaan | B | 14.150.000,00 | 14.150.000,00 | 0,00 |
| 2.8 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | B | 335.200.000,00 | 335.200.000,00 | 0,00 |
| 2.6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | B | 27.240.000,00 | 27.240.000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Dinas Perikanan | B | 59.632.000,00 | 59.632.000,00 | 0,00 |
| 2.11 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | B | 14.087.000,00 | 14.087.000,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | B | 15.082.200,00 | 15.082.200,00 | 0,00 |
| 2.12 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | B | 11.565.500,00 | 11.565.500,00 | 0,00 |
| 4.4.4 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | B | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 |
| 4.7 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | B | 26.334.500,00 | 26.334.500,00 | 0,00 |
| 2.5 | Dinas Lingkungan Hidup | B | 59.730.600,00 | 57.855.600,00 | 1.875.000,00 |
| 3.2 | Dinas Pariwisata | B | 14.087.000,00 | 14.087.000,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | B | 11.565.500,00 | 11.565.500,00 | 0,00 |
| 4.5 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | B | 227.250.000,00 | 227.250.000,00 | 0,00 |
| 4.11.1 | Kecamatan Lubuk Linggau Barat I | B | 77.731.667,00 | 77.731.667,00 | 0,00 |
| 4.11.2 | Kecamatan Lubuk Linggau Barat II | B | 134.500.000,00 | 134.500.000,00 | 0,00 |
| 4.11.4 | Kecamatan Lubuk Linggau Timur II | B | 27.087.000,00 | 27.087.000,00 | 0,00 |
| 4.11.6 | Kecamatan Lubuk Linggau Utara II | B | 79.965.800,00 | 79.965.800,00 | 0,00 |
| 4.11.7 | Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I | B | 607.240.300,00 | 607.240.300,00 | 0,00 |
| 4.11.8 | Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II | B | 14.087.000,00 | 14.087.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | | 3.770.410.997,50 | 3.104.978.102,50 | 665.432.895,00 |

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA – LO

Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO merupakan selisih antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional setelah dikurangi dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar surplus Rp162.527.230.193,64 dan surplus Rp85.474.816.347,25

5.4.6 POS LUAR BIASA – LO

Nilai Pos Luar Biasa – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp647.143.000,00) dan (Rp740.224.000,00)

5.4.6.1 BEBAN LUAR BIASA – LO

Nilai Beban Luar Biasa – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp647.143.000,00), dan (Rp740.224.000,00)

5.4.7 SURPLUS/DEFISIT – LO

Nilai Surplus/Defisit – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar surplus Rp161.880.087.193,64 dan surplus Rp84.734.592.347,24

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

Rincian Arus Kas Bersih dari masing-masing Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.83. Rincian Arus Kas Bersih per Jenis Aktivitas

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---|------------------------|------------------------|
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp325.608.207.617,34 | Rp338.887.400.148,19 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan | (Rp427.929.654.438,00) | (Rp331.394.237.141,00) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | Rp105.468.552.700,00 | Rp18.338.750.000,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran | (Rp74.642,00) | (Rp424.000,00) |

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Tabel 5.84. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--|--------------------|--------------------|
| Pendapatan Pajak Daerah | 50.387.265.416,00 | 39.064.581.076,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 5.758.970.894,00 | 5.207.620.310,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.437.443.567,98 | 2.230.523.344,23 |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 45.543.012.662,35 | 81.794.912.028,16 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 806.854.254.743,00 | 665.026.737.478,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 0,00 | 24.434.975.000,00 |

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 149.245.182.695,21 | 67.373.158.231,30 |
| Bantuan Keuangan | 0,00 | 41.430.397.725,00 |
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 29.393.500.000,00 |
| Jumlah | 1.060.226.129.978,54 | 955.956.405.192,69 |

5.5.1.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.85. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Belanja Pegawai | 359.220.909.073,00 | 346.392.440.564,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 325.350.180.851,20 | 257.384.866.728,50 |
| Belanja Bunga | 7.315.243.513,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 38.608.945.924,00 | 12.486.473.752,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 3.475.500.000,00 | 65.000.000,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 647.143.000,00 | 740.224.000,00 |
| Jumlah | 734.617.922.361,20 | 617.069.005.044,50 |

5.5.1.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih arus kas masuk setelah dikurangi dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp325.608.207.617,34 dan Rp338.887.400.148,19.

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan arus keluar kas diperoleh dari pembelian aset tetap.

5.5.2.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp273.272.649,00 dan Rp0,00.

5.5.2.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.86. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Belanja Tanah | 8.322.213.959,00 | 0,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 25.905.888.028,00 | 34.974.246.850,00 |
| Belanja Bangunan dan Gedung | 47.779.448.452,00 | 59.810.307.168,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 336.645.742.957,00 | 228.810.890.667,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 9.549.633.691,00 | 7.798.792.456,00 |
| Jumlah | 428.202.927.087,00 | 331.394.237.141,00 |

5.5.2.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan merupakan selisih arus kas masuk setelah dikurangi dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp427.929.654.438,00) dan (Rp331.394.237.141,00)

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

5.5.3.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pendanaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp105.468.552.700,00 dan Rp18.750.000.000,00.

5.5.3.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pendanaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp231.250.000,00.

5.5.3.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih arus kas masuk setelah dikurangi dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp105.468.552.700,00 dan Rp18.338.750.000,00

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris yaitu penggunaan sisa kas PSG. PFK menggambarkan

kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum, dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

5.5.4.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Jumlah arus kas masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp87.711.642.400,80 dan Rp70.634.945.559,64

5.5.4.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Keuangan Anggaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp87.711.717.042,80 dan Rp70.635.369.559,64

5.5.4.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran merupakan selisih arus kas masuk setelah dikurangi dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp74.642) dan (Rp424.000,00)

5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE

Kenaikan/Penurunan Kas bersih selama periode pelaporan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.147.031.237,34 dan Rp25.831.489.007,19, dan adapun perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD sebagai berikut:

Tabel 5.87. Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD

| Uraian | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--|------------------------|------------------------|
| Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode | 3.147.031.237,34 | 25.831.489.007,19 |
| Saldo Awal Kas di BUD | 27.978.178.704,83 | 2.146.689.697,64 |
| Saldo Akhir Kas di BUD | 31.125.209.942,17 | 27.978.178.704,83 |
| Kas Di Kas Daerah | 27.373.128.829,10 | 224.311.087,56 |
| Kas Di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| Kas Di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 1.695.027,00 |
| Deposito On Call | 0,00 | 0,00 |
| Kas Di Badan Layanan Umum Daerah | 3.653.430.896,07 | 27.431.323.216,07 |
| Kas Lainnya | 37.587.783,00 | 1.111.374.865,00 |
| Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN) | 0,00 | 15.941.945,20 |
| Kas di Bendahara Sekolah (BOS APBN) | 90.095.458,00 | 296.352.670,00 |

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Tahun 2022 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.048.330.225.623,83 dan sedangkan Ekuitas Awal Tahun 2021 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dengan nilai sebesar Rp2.864.356.032.344,04.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp161.880.087.193,64 dan Rp84.734.592.347,24

5.6.3 EKUITAS AKHIR SEBELUM DAMPAK KUMULATIF

Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak Kumulatif merupakan selisih antara ekuitas awal setelah memperhitungkan surplus/defisit LO. Ekuitas Akhir sebelum Dampak Kumulatif untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.210.210.312.817,47 dan Rp2.949.090.624.691,28.

5.6.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Tabel 5.88. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

| Uraian | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Koreksi Nilai Persediaan | 11.284.327.000,00 | 1.140.477.170,13 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | 30.234.426.107,00 | 93.285.530.732,00 |
| Koreksi Ekuitas Lainnya | 7.723.633.281,42 | 4.813.593.030,42 |
| Jumlah Dampak Kumulatif | 49.242.386.388,42 | 99.239.600.932,55 |

5.6.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.259.452.699.205,89 dan Rp3.048.330.225.623,83.

5.7 KEWAJIBAN KONTIJENSI

5.7.1 Pinjaman PEN

Pagu pinjaman yang disepakati adalah maksimal senilai Rp125.000.000.000,00 yang dicairkan dalam tiga kali pencairan. Tarif bunga pinjaman yang dikenakan adalah 5,66% per tahun yang dihitung dari saldo pinjaman terutang.

Kewajiban Jangka Panjang untuk program PEN yang harus dianggarkan pada tahun 2022 adalah senilai Rp7.315.243.513,00 yang terdiri atas biaya bunga, biaya pengelolaan pinjaman dan biaya provisi 1%.

Tabel 5.89. Kebutuhan Anggaran untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Program PEN per 2022

| Uraian | Jumlah (dalam Rupiah) |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Pencairan | 105.468.552.700,00 |
| Baki Utang per 31 Desember 2022 | 124.038.552.700,00 |

| Uraian | Jumlah (dalam Rupiah) |
|---|--------------------------|
| Baki Utang per 30 September (tanggal Ulang Tahun Perjanjian) untuk dasar penghitungan pembayaran Biaya Pengelolaan Pinjaman | 124.038.552.700,00 |
| 2. Pembayaran | |
| Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo per Desember 2022 | 0 |
| Bunga efektif (SM) 5,66 % pa | 5.845.386.664,00 |
| Biaya Pengelolaan Pinjaman per 30 September 2022 | 229.471.322,00 |
| Biaya Provisi 1% , dibayar pada pencairan ke 3 per Maret 2022 | 1.240.385.527,00 |
| Total Bunga dan Biaya Pinjaman | 7.315.243.513,00 |

5.7.2 Keputusan Perdamaian PT Cikenceng

Penjelasan mengenai adanya risiko kompensasi kepada masyarakat yang berada di tanah PT Cikenceng dapat dijelaskan bahwa, dengan tercapainya perdamaian antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan PT Cikenceng yang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.LLG tanggal 23 Oktober 2018, dimana sebagian lahan PT Cikenceng sudah menjadi aset Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan yang tercantum pada keputusan tersebut diatas, namun pada lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Lubuklinggau yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat tidak dapat dilakukan ganti rugi atas tanam tumbuh berdasarkan keputusan Pengadilan, sehingga sampai dengan saat ini masih bersengketa dengan masyarakat dikarenakan masyarakat menginginkan ganti rugi atas tanam tumbuh yang ada pada lahan tersebut sedangkan pada keputusan pengadilan Pemerintah Kota Lubuklinggau diperintahkan untuk merelokasi masyarakat yang memanfaatkan lahan ke lokasi yang telah ditentukan oleh keputusan pengadilan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Dasar pembentukan Kota Lubuklinggau adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4114).

Kota Lubuklinggau memiliki luas wilayah lebih kurang 401,50 km², yang secara astronomis terletak pada posisi 102°40'00" - 103°30'00" Bujur Timur dan 3°4'10" - 3°22'30" Lintang Selatan, dan terletak pada ketinggian 129m dari permukaan laut. Secara administratif, Kota Lubuklinggau memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Kota Lubuklinggau wilayahnya terdiri dari delapan Kecamatan dan 72 Kelurahan, luas wilayah administrasi Kota Lubuklinggau per Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1. Luas Wilayah Administratif Kota Lubuklinggau per Kecamatan

| No | Nama Kecamatan | Luas Wilayah (KM ²) |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Kecamatan Lubuklinggau Barat I | 54,81 |
| 2 | Kecamatan Lubuklinggau Barat II | 10,84 |
| 3 | Kecamatan Lubuklinggau Timur I | 13,90 |
| 4 | Kecamatan Lubuklinggau Timur II | 10,12 |
| 5 | Kecamatan Lubuklinggau Utara I | 152,40 |
| 6 | Kecamatan Lubuklinggau Utara II | 37,11 |
| 7 | Kecamatan Lubuklinggau Selatan I | 85,15 |
| 8 | Kecamatan Lubuklinggau Selatan II | 37,17 |
| Total | | 401,50 |

Sumber: Bappeda Kota Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 2.000-2.500mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Wilayah Kota Lubuklinggau memiliki luas 401,50km². Dari luas tersebut kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. Sebelah barat Kota Lubuklinggau terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap.

Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

- a. *Aluvial*, tanah warna coklat kekuning-kuningan yang berada di bagian dataran yang cocok untuk tanaman padi dan palawija;
- b. *Assosiasi Gleihumus*, yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi;
- c. *Litosol*, yang cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga sangat potensial untuk pengembangan ternak; dan
- d. *Regosol*, sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, yang cocok untuk tanaman padi, palawija, dan tanaman keras lainnya.

6.2 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan

SOTK Pemerintahan Kota Lubuklinggau dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Pada Tahun 2019, terdapat perubahan susunan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lubuklinggau, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau. Susunan perangkat daerah yang baru sebagai berikut:

- 1 Sekretariat Daerah;
- 2 Sekretariat DPRD;
- 3 Inspektorat Daerah;
- 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5 Dinas Kesehatan;
- 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8 Satuan Polisi dan Pamong Praja;
- 9 Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana;
- 10 Dinas Sosial;
- 11 Dinas Ketenagakerjaan;
- 12 Dinas Ketahanan Pangan;
- 13 Dinas Lingkungan Hidup;
- 14 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 15 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 17 Dinas Perhubungan;
- 18 Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- 19 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 21 Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 23 Dinas Perikanan;
- 24 Dinas Pariwisata;
- 25 Dinas Pertanian;
- 26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 29 Badan Pendapatan Daerah ;
- 30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 31 Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
- 32 Kecamatan Lubuklinggau Barat II;
- 33 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
- 34 Kecamatan Lubuklinggau Selatan II;
- 35 Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
- 36 Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
- 37 Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
- 38 Kecamatan Lubuklinggau Utara II; dan
- 39 Kelurahan.

6.3 Kondisi Pegawai/Tenaga Kerja

Jumlah pegawai pada Pemerintah Kota Lubuklinggau berdasarkan golongan per 31 Desember 2022 sebanyak 3735 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2. Sebaran Pegawai Pemerintah Kota Lubuklinggau

| Golongan | Eselon | | | | | Tenaga Fungsional | | | Staf | Jumlah |
|-------------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | I | II | III | IV | V | Pendidikan | Kesehatan | Lainnya | | |
| Golongan IV/e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golongan IV/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golongan IV/c | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| Golongan IV/b | 0 | 9 | 23 | 3 | 0 | 222 | 15 | 7 | 7 | 286 |
| Golongan IV/a | 0 | 1 | 83 | 38 | 0 | 226 | 26 | 12 | 18 | 404 |
| Golongan I/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub Jumlah | 0 | 36 | 106 | 41 | 0 | 463 | 42 | 20 | 25 | 733 |
| Golongan III/d | 0 | 0 | 50 | 385 | 2 | 238 | 164 | 40 | 104 | 983 |
| Golongan III/c | 0 | 0 | 5 | 253 | 0 | 115 | 156 | 26 | 122 | 677 |
| Golongan III/b | 0 | 0 | 0 | 78 | 9 | 87 | 162 | 22 | 135 | 493 |
| Golongan III/a | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 70 | 38 | 18 | 369 | 521 |
| Golongan I/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub Jumlah | 0 | 0 | 55 | 742 | 11 | 510 | 520 | 106 | 730 | 2674 |
| Golongan II/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 87 | 103 |
| Golongan II/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 114 | 132 |
| Golongan II/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 44 | 55 |
| Golongan II/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 |
| Golongan I/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 20 | 264 | 310 |
| Golongan I/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Golongan I/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Golongan I/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golongan I/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Total | 0 | 36 | 161 | 783 | 11 | 984 | 577 | 146 | 1037 | 3735 |

6.4 Penggantian Manajemen Pemerintahan selama Tahun Berjalan

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Lubuklinggau melakukan mutasi atau pertukaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 15 orang dan perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 12 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.3 Rotasi Pejabat Eselon II

| No | Nama/NIP | Jabatan Lama | Jabatan Baru | No dan TGL SK |
|----|----------|--------------|--------------|---------------|
|----|----------|--------------|--------------|---------------|

| No | Nama/NIP | Jabatan Lama | Jabatan Baru | No dan TGL SK |
|----|--|---|---|--|
| 1 | Ir. NOBEL NAWAWI, MT / 196308191989031005 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 2 | HERDAWAN, SE, MM / 196607021993031004 | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 3 | H. EMRA ENDI KESUMA, SE, M.Si / 196712061994031004 | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 4 | Drs. HERI SURYANTO, MM / 197207171992011001 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 5 | Drs. HERI ZULIANTA / 196607151993031005 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | Kepala Dinas Pariwisata | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 6 | CIKWI, S.Km, M.Kes / 197307291997031003 | Kepala Dinas Kesehatan | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 7 | Drs. M. JOHAN IMAN SITEPU / 197411291993031002 | Kepala Dinas Pariwisata | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 8 | Drs. ERWIN ARMEIDI, M.Si / 197005311990031002 | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika | Kepala Dinas Kesehatan | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 9 | Drs. H. PURNOMO, M.Pd / 196403161991031005 | Kepala Dinas Ketenagakerjaan | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 10 | H. TAMRI, S.Pd, MM / 196611121991031007 | Asisten Administrasi Umum | Kepala Dinas Ketenagakerjaan | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 11 | Ir. EKA ARDI AGUSCIK / 196408131993121001 | Kepala Dinas Perikanan | Kepala Dinas Pertanian | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 12 | DEDI YANSYAH, SP, M.Si / 197004061997031007 | Kepala Dinas Pertanian | Kepala Dinas Perikanan | 821.2/57/KPTS/BKPS DM/2022 Tanggal 18 Januari 2022 |
| 13 | HASAN, A.UY, SH, MH / 196612261988031001 | Sekretaris Dinas Sosial | Kepala Dinas Sosial | 821.2/453/KPTS/BKP SDM/2022 Tanggal 15 Juli 2022 |
| 14 | RESTA IRWAN PUTRA, SE / 196905121997031006 | Sekretaris Inspektorat | Inspektur | 821.2/453/KPTS/BKP SDM/2022 Tanggal 15 Juli 2022 |
| 15 | WIWIN EKA SAPUTRA, M.HI / 198302072010011016 | Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 821.2/453/KPTS/BKP SDM/2022 Tanggal 15 Juli 2022 |

Tabel 6.4 Daftar Perubahan Nama OPD

| No | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
|----|---|---|
| 1 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana |
| 3 | Dinas Komunikasi, dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| 5 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 6 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | Badan Pendapatan Daerah |

6.5 Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

6.6 Informasi Penting Lainnya

a. Sengketa Lahan dengan PT Cikenceng

Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Aset Tetap menyajikan informasi terkait dengan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau di atas lahan yang bersengketa dengan PT Ckr dengan nilai sebesar Rp117.941.650.164,00. Permasalahan lahan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dimana terakhir terdapat Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 259K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017 tanggal 23 Januari 2017 menyatakan bahwa 11 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau adalah batal.

Adapun 11 sertifikat Hak Pakai yang dibatalkan tersebut sebagai berikut:

- a) Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 19 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 66/Ptn.ulu/2010 tanggal 9 Maret 2010 dengan seluas tanah 17.229 M² atas nama Rumah Dinas Walikota Lubuklinggau;
- b) Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 48/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan seluas tanah 1.319 M² atas nama Balai Kantor Camat Lubuklinggau Utara I;
- c) Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 46/Ptn.Iilir/2010 tanggal 09 Maret 2010 dengan seluas 1.999 M² atas nama Kantor Camat Lubuklinggau Utara I;
- d) Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Kelurahan Belalau II tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 3/BII.II/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 60.171 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau; Balai Benih Tanaman Pangan;
- e) Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Belalau II tanggal 28 April 2005, Surat Ukur Nomor 1/BII/2005 tanggal 20 April 2005 dengan luas 11.400 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau (dipergunakan untuk SDN Nomor 80 Lubuklinggau);
- f) Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Belalau II tanggal 08 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 2/BII.II/2010 tanggal 28 Agustus 2010 dengan seluas 978 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau Kantor Lurah Belalau II;

- g) Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 03 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 68/ptn.ulu/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 13.734 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk SMPN Nomor 12;
- h) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005 Kelurahan Belalau II tanggal 13 November 2013, Surat Ukur Nomor 4/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 310 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- i) Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Kelurahan Belalau II tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor 05/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 625 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- j) Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 19 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 47/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan luas 1.491 M² atas nama Rumah Dinas Camat Lubuklinggau Utara I; dan
- k) Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 50/Ptri.Iilir/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 11.070 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau unutup Puskesmas.

PT Ckr melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 November 2017 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Adapun pihak Tergugat adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat II dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat III.

Secara materi gugatan nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kerugian material sebesar Rp306.594.565.000,00 yang terdiri dari kerugian materiil atas penguasaan lahan sebesar Rp203.528.465.000,00 dan atas penggantian sewa atas penggunaan dan pemanfaatan lahan sebesar Rp103.066.100.000,00; dan
- b) Kerugian *immaterial* dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00.

Apabila PT Ckr memenangkan gugatan tersebut, maka Pemerintah Kota Lubuklinggau mempunyai kewajiban untuk memenuhi nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00.

Berdasarkan Gugatan PT Ckr di Pengadilan Negeri Lubuklinggau maka Pemerintah Kota Lubuklinggau disebut Tergugat, Kantor BPN Kota Lubuklinggau Tergugat I, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Tergugat II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tergugat III dan masing-masing telah datang menghadap:

- 1) PT Ckr, beralamat di Bellagio Residence Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 Unit UG-25 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murba Sitompul, S.,MH dkk, semua Advokat yang berkedudukan di Plaza Sentral Lt.9, JL. Jend. Sudirman Kav.47-48 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 196/P/2017/PN.LLG tertanggal 04 Desember 2017, menurut surat gugatan dalam perkara daftar

register No.40/Pdt.G/2017/PN.LLG, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”.

- 2) II.Pemerintah Kota Lubuklinggau, beralamat di jalan Garuda Nomor 10, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada “Ramdlon Naning & Associates” berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C No.3 Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta-55242, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/P/2018/PN.LLG tertanggal 03 Januari 2018, selanjutnya disebut “TERGUGAT”
- 3) III.Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, beralamat di Jalan Sutan Mahmud Badaruddin II No. 1 Kelurahan Air Kuti Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Makmun, SH dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 06/100.2-16.73/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT I”.
- 4) IV.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan POM IX Kampus No.1296 dalam hal ini memberi kuasa kepada Helwani, SH.,MM. dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 66/St.16.500/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 dan Surat Khusus yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan nomor register 13/P/2018/PN.LLG tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT II”.
- 5) V. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Ketut Mangku selaku Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8/Sk/III/2018 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan nomor register 60/P/2018/PN.LLG tertanggal 04 April 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT III”, setelah beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, masing-masing Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan keterangan, maka atas dasar saling menghargai disepakati untuk mengakhiri Persengketaan Perdata tersebut dengan Perdamaian.

Penggugat disatu sisi disebut Pihak Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai “Para Turut Tergugat”, untuk Para Turut Tergugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut “Pihak Tergugat”. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang difasilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka dibuat Akta Perdamaian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang terbuka untuk umum.

Para Pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan Perdata antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses persidangan, untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat adalah pemegang ex. Hak *Erfach Verponding* nomor 113, terhadap tanah perkebunan yang dahulu terletak dan dikenal di kecamatan Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, yang sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuklinggau, sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.19/HGU/BPN/92, tanggal 19 Agustus Tahun 1992, dengan luas ±1.245 HA setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belau;
- b) Bahwa dalam areal tanah tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) bangunan milik Pemerintah Kota Lubuklinggau dan 5 (Lima) instansi vertikal yaitu:
1. Rumah Dinas Walikota Lubuklinggau;
 2. Gedung Wanita;
 3. Kantor Camat Lubuklinggau Utara I;
 4. Taman Kanak-Kanak Pembina 2;
 5. Tempat Pembuangan Akhir Petanang;
 6. Rumah Dinas Camat Lubuklinggau Utara I;
 7. Balai Kantor Camat Lubuklinggau Utara I;
 8. BPP/BBI Belalau II;
 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
 10. Puskesmas Petanang/Rumah Sakit Pratama;
 11. Puskesmas Pembantu Belalau II;
 12. Poskeslur Belalau II;
 13. Kantor Lurah Belalau II;
 14. Kantor Lurah Petanang Ilir;
 15. Kantor Lurah Petanang Ulu;
 16. Poskeslur Petanang Ulu;
 17. SDN 75 Petanang Ulu;
 18. Sekolah Dasar Negeri 80;
 19. Terminal Petanang;
 20. SMKN 4 Lubuklinggau;
 21. Perusahaan Daerah Air Minum;
 22. Lapangan Sepak Bola Petanang dan Gedung Beladiri;
 23. Kolam renang (Sport Centre);
 24. GOR Serbaguna;
 25. Lapangan Tembak;
 26. Gedung DPRD Lubuklinggau;
 27. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 28. Jalan SP Lintas Sumatera (Jalan Negara);
 29. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 30. Dinas Pendidikan;
 31. Sekolah Menengah Atas Negeri 3/Terminal;
 32. Sekolah Luar Biasa; dan
 33. PKK.
- Serta 5 (Lima) buah bangunan instansi vertikal yaitu:
1. Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Komandan Rayon Militer Kota Lubuklinggau;
 3. Kepolisian Sektor Lubuklinggau;
 4. Kementerian Agama Sektor Lubuklinggau; dan

5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

- c) Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi perselisihan berlarut-larut sehingga mengakibatkan kerugian kedua belah pihak oleh karenanya perlu adanya penyelesaian menyeluruh dan bermanfaat bagi kedua belah pihak;
- d) d. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak setuju dan sepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dihadiri oleh PT Ckr selaku pihak penggugat dan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pihak tergugat telah bersepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Kedua pihak sepakat tanah perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuklinggau, berdasarkan ex. Hak *Erpacht Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas \pm 1.245 Ha setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belalau harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan wilayah kota dan tata ruang dan tata wilayah baru sesuai perkembangan Kota Lubuklinggau.
- b) Kedua pihak sepakat perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuklinggau, berdasarkan ex. Hak *Erpacht Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas + 1.245 Ha harus dikembangkan menjadi sebuah hunian yang nyaman, modern tanpa meninggalkan jati diri bangsa, dikembangkan menjadi kota metropolitan dan disebut sebagai kawasan GRAND LINGGAU MADANI, guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Lubuklinggau.

Akta perdamaian tersebut juga menyepakati syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a) Tergugat mengakui hak keperdataan penggugat yang melekat atas tanah perkebunan ex. Hak *Eparchy Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas \pm 1.245 Ha;
- b) Dalam rangka pengakhiran sengketa, pihak penggugat bersedia melepaskan sebagian hak keperdataan yang melekat pada tanah seluas + 1.245 Ha tersebut

dengan batas-batas yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peta Grand Linggau Madani (Peta Lampiran A);

- c) Pihak penggugat tidak menuntut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 23 Januari 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 259 K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- d) Pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan serta sarana umum lainnya di tempat lahan yang sudah dilepaskan hak keperdataannya oleh Penggugat + 109 Ha akan dibangun Tergugat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat;
- e) Sesuai ketentuan yang berlaku, Tergugat berdasarkan kewenangannya memastikan Penggugat memperoleh haknya, serta memberikan seluruh ijin yang diperlukan dalam rangka pengembangan Grand Linggau Madani sebagaimana dimaksud Peta Lampiran A;
- f) Tergugat/ Pemerintah Kota Lubuklinggau memasukkan Lampiran A Peta Peruntukan Grand Linggau Madani, dalam substansi revisi Rencana Tata Ruang dan/atau dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan itu maka Tergugat melakukan proses revisi tata ruang melalui PKRUTR dan/atau RDTR selanjutnya diajukan kepada Turut Tergugat III yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan persetujuan.

b. Tambahan Kewajiban kepada BPJS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Dasar Perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Prajurit atau Anggota Polri mengalami perluasan dari sebelumnya terdiri atas gaji atau upah pokok dan tunjangan keluarga menjadi terdiri atas **Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah**. Hal ini mengakibatkan penambahan kewajiban iuran bagi pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dan bagi peserta PPU. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, pemerintah Kota Lubuklinggau belum mencatat tambahan kewajiban tersebut karena nilai tambahan kewajiban tersebut masih dalam proses rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang.

6.7 Ihktisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kota Lubuklinggau dievaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Secara umum capaian dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6.5. Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuklinggau Tahun 2022

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2021 | | 2022 | |
|---|---------|----------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas | | Indeks Sumber Daya Manusia | Indeks | 72,66 | 73,00 | 72,88 | 76,30 |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | | (ISDM) | | | | | |
| 1.1.1 | Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat | Indeks Pengetahuan | Indeks | 0,704 | 0,702 | 0,707 | 0,702 |
| 1.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas | Indeks Kesehatan | Indeks | 0,76 | 0,76 | 0,765 | 0,83 |
| Mewujudkan Masyarakat Madani | | Indeks Madani | Indeks | 70 | 75,3 | 72 | - |
| 1.2.1 | Meningkatnya kesadaran <i>civil society</i> | Indeks Kesadaran Demokrasi | Indeks | 80,2 | 75,713 | 82 | - |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | | Pertumbuhan ekonomi | % | 5,06 | 3,15 | 5,42 | 4,51 |
| 2.1.1 | Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif | Nilai ICOR | Nilai | 7,4 | 14,85 | 7,18 | - |
| 2.1.2 | Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa | PDRB sektor perdagangan dan jasa | Rp (Milliar) | 1.715,91 | 1992,35 | 1.794,51 | - |
| 2.1.3 | Meningkatnya pertumbuhan Industri | Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB | % | 3,18 | 2,24 | 5,42 | - |
| 2.1.4 | Meningkatnya pengembangan pariwisata | Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB | % | 3,89 | 3,67 | 3,95 | - |
| Meningkatkan kesejahteraan sosial | | Indeks Gini | | 0,336 | 0,36 | 0,334 | - |
| 2.2.1 | Menurunnya pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6,4 | 6,27 | 5,73 | 5,94 |
| 2.2.2 | Meningkatnya daya beli masyarakat | Indeks Pengeluaran | Indeks | 0,803 | 0,48 | 0,808 | 0,502 |
| 2.2.3 | Menurunnya tingkat kemiskinan | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks | 1,96 | 1,97 | 1,5 | 1,5 |
| | | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | Indeks | 0,51 | 0,46 | 0,5 | 0,27 |
| | | Angka Kemiskinan | % | 12,6 | 13,23 | 12,51 | 12,68 |
| 2.2.4 | Menguatnya ketahanan pangan daerah | Rasio kecukupan pangan | Rasio | 1,05 | 0,92 | 1,1 | - |
| Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan | | Indeks layanan infrastruktur | Indeks | 51,76 | 45,287 | 54,01 | - |
| 3.1.1 | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman | Luas Kawasan Kumuh | Ha | 515,66 | 442,37 | 515,36 | 527,05 |
| 3.1.2 | Meningkatnya infrastruktur dasar | Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan | % | 60 | 60,43 | 63 | - |
| 3.1.3 | Meningkatnya pengembangan wilayah | Indeks Aksesibilitas | Indeks | 0,763 | 0,707 | 0,775 | - |
| 3.1.4 | Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 64,95 | 60,43 | 65,64 | 64,86 |
| Mewujudkan Reformasi Birokrasi | | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 54,26 | | 55,43 | - |
| 4.1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Indeks | 3,9 | 4,09 | 3,94 | 4,26 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 80 | 78,88 | 81 | 79,97 |
| 4.1.2 | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel | Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai | BB | BB | BB | BB |
| 4.1.3 | Meningkatnya kapasitas birokrasi | Indeks Kapasitas Birokrasi | Indeks | 58,7 | 66,2 | 59,7 | - |

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuklinggau, 2022

BAB VII

PENUTUP

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Lubuklinggau telah berusaha menyajikan dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan selama tahun 2022 yang bersumber dari APBD TA 2022 Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Laporan Keuangan.

Proyeksi pendapatan daerah dianggarkan Tahun 2022 sebesar Rp1.090.512.850.566,00 atau mengalami kenaikan sebesar 14,08% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp955.956.405.192,69. Realisasi pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp1.060.499.402.627,54 atau 97,25% dari anggaran atau mengalami kenaikan 10,94% dari realisasi Tahun 2021.

Jumlah belanja daerah dianggarkan Tahun 2022 sebesar Rp1.223.959.581.971,00 atau mengalami kenaikan 29,05% dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp948.463.242.185,50. Realisasi belanja daerah TA 2022 sebesar Rp1.162.820.849.448,20 atau 95,00% dari anggaran atau naik sebesar 22,60% dari realisasi anggaran Tahun 2021.

Surplus (Defisit) Tahun 2022 dianggarkan defisit sebesar (Rp133.446.731.405,00), dengan realisasi defisit sebesar (Rp102.321.446.820,66). Realisasi pembiayaan Tahun 2022 berupa penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp27.978.178.704,83 dan Penerimaan pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp0,00, Penerimaan pembiayaan sebesar Rp105.468.552.700,00 atau 100,00% sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp0,00.

Pada akhir Tahun 2022, jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuklinggau sebesar Rp3.161.616.859.195,68 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp2.982.024.202.202,10 mengalami peningkatan sebesar Rp179.594.656.993,58. Kewajiban Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 sebesar Rp139.983.584.823,00 seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Tahun 2022 tersebut dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp141.060.527.012,34 mengalami penurunan sebesar Rp1.076.942.189,34.